

TINJAUAN MATA KULIAH

Etika Pemerintahan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, antara lain sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai cabang filsafat. Sebagai ilmu pengetahuan, etika pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang pandangan moral dan persoalan moral yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab dalam bidang pemerintahan. Dengan demikian subjek ilmu etika pemerintahan adalah para aparatur pemerintahan. Sebagai cabang filsafat, etika pemerintahan termasuk salah satu jenis etika normatif atau etika terapan yang membahas tentang hakekat baik buruknya suatu perbuatan manusia (moral) yang berlaku bagi para aparatur pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pandangan dan persoalan moral tersebut.

Pembahasan objek etika pemerintahan menggunakan metode filsafat, yaitu secara radikal, esensial, kritis, analitis dan komprehensif (holistik), sebagaimana ciri filsafat. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang jelas dan terpilah (*clear dan distinctive*) tentang hakekat baik buruknya perbuatan manusia yang berlaku bagi para aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pentingnya pembahasan materi etika pemerintahan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan antara lain dapat menjadi bekal mental dan dasar analisis dalam menghadapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang ilmu pemerintahan. Secara praktis tujuan penyajian materi etika pemerintahan adalah sebagai kontrol sosial dalam merespon berbagai persoalan dan penyimpangan terhadap nilai-nilai moral yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah.

Pembahasan bahan ajar etika pemerintahan antara lain meliputi: pengertian etika, moral dan ajaran moral; nilai, norma, moral dan sanksi; kebebasan, kewajiban dan tanggungjawab moral; asas-asas etis pemerintahan; wewenang dan tanggungjawab pemerintah; keadilan sebagai kebajikan moral bagi para aparatur/pejabat pemerintahan; beberapa teori tentang keadilan; etika profesi; aliran-aliran dalam etika dan teori etika. Penyajian materi bahan ajar ini terdiri dari 12 bab (modul) dan beberapa sub pokok bahasan sebagai berikut.

Modul 1 (Bab I). Pendahuluan (Latar Belakang, Objek /Ruang Lingkup dan Tujuan Mempelajari Etika Pemerintahan).

Kegiatan belajar 1: menjelaskan tentang latar belakang pentingnya etika pemerintahan, objek etika, perbedaan antara objek etika umum dengan objek etika pemerintahan, jenis etika dan ciri masing-masing, kedudukan etika pemerintahan di antara cabang etika, serta tujuan mempelajari etika pemerintahan.

Modul 2 (Bab II). Penjernihan Konsep Tentang Pengertian Etika, Moral, dan Ajaran Moral.

Kegiatan Belajar 2. menjelaskan pengertian secara etimologis dan terminologis tentang etika dan moral, persamaan dan perbedaan prinsip antara etika, moral, dan ajaran moral. Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan pula tentang pengertian etika pemerintahan.

Modul 3 (Bab III). Hubungan antara Empat (4) Unsur : Nilai, Norma, Moral dan Sanksi.

Kegiatan Belajar 3. menjelaskan tentang pengertian/konsep tentang nilai, norma, moral dan sanksi. Setelah menjelaskan konsep tentang nilai, norma, moral dan sanksi, bab ini juga menjelaskan hubungan antara 4 hal tersebut.

Modul 4. Kebebasan, Kewajiban, Tanggungjawab Moral, dan Kesadaran Moral,

Kegiatan Belajar 4. menjelaskan tentang makna kebebasan, kewajiban, tanggungjawab moral, dan kesadaran moral, serta hubungan antara empat unsur tersebut. Pembahasan bab ini merupakan dasar pemahaman terhadap makna suatu perbuatan manusia dapat dinilai sebagai perbuatan bermoral atau tidak.

Modul 5. Asas-asas Etis Administrasi Pemerintahan

Kegiatan Belajar 5. menjelaskan membahas tentang asas-asas etis yang berlaku dalam bidang administrasi pemerintahan. Bab ini dibagi dalam sub pokok bahasan penting, yaitu Asas-asas Etis Administrasi Pemerintahan dan Kode Etik Administrasi Pemerintahan.

Modul 6. Asas-asas Pemerintahan dan Asas Etis Pemerintahan

Kegiatan Belajar 6 menjelaskan tentang asas-asas etis yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (masyarakat). Asas-asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai pengambil kebijakan. Bab ini dibagi dalam sub pokok bahasan penting, yaitu Asas-asas Pemerintahan dan Asas Etis Pemerintahan

Modul 7. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Kegiatan Belajar 7. menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab/ pertanggungjawaban pemerintah dan hubungan antara tiga hal tersebut.

Modul 8. Tri rangkai Pertimbangan Manusia dan Tri Rangkai Tindakan Manusia.

Kegiatan Belajar 8. menjelaskan tentang Ide Agung manusia yang merupakan asal mula ide/gagasan manusia tentang Tri rangkai Pertimbangan Manusia dan Tri Rangkai Tindakan Manusia. Tri Rangkai Pertimbangan Manusia merupakan 3 hal yang menjadi dasar manusia sebelum mengambil keputusan. Sedangkan Tri Rangkai Tindakan Manusia adalah dasar penilaian tindakan moral manusia, apakah baik atau tidak.

Modul 9. Keadilan Sebagai Kebajikan Moral Bagi Aparatur Pemerintahan

Kegiatan Belajar 9. menjelaskan tentang makna keadilan secara umum dan kaitannya dengan tugas aparatur pemerintahan. Selain itu, bab ini juga memberikan contoh pokok-pokok pikiran tentang kebajikan menurut beberapa filsuf Yunani Kuno, antara lain menurut Sokrates, Plato dan Aristoteles.

Modul 10. Teori Keadilan

Kegiatan Belajar 10. menjelaskan tentang pengertian keadilan dan contoh teori keadilan menurut beberapa filsuf, antara lain menurut Plato dan John Rawls.

Modul 11 Etika Profesi

Kegiatan Belajar 11. menjelaskan pengertian etika profesi yang di dalamnya dibedakan antara jenis profesi umum dan profesi luhur. Berdasarkan jenis profesi,

maka bab ini juga menjelaskan kedudukan etika administrasi pemerintahan dalam etika profesi dan pentingnya etika profesi.

Modul 12. Aliran-Aliran dalam Etika dan Teori Etika

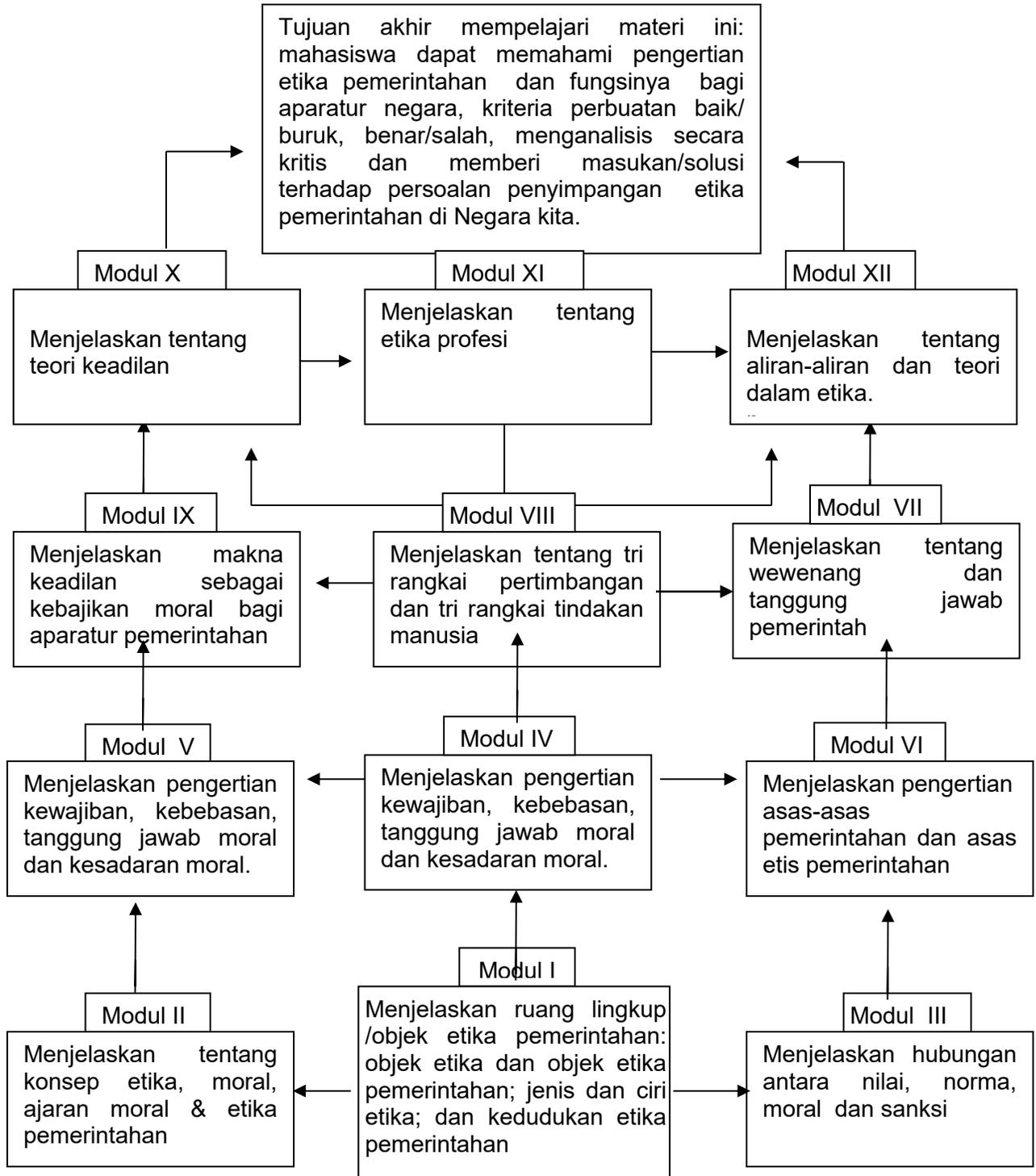
Kegiatan Belajar 12. menjelaskan tentang aliran-aliran dalam etika dan beberapa teori etika, serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Tujuan akhir secara komprehensif matakuliah ini diajarkan kepada mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan adalah agar saudara diharapkan dapat memahami pengertian etika pemerintahan dan fungsinya sebagai orientasi dan bekal mental bagi aparatur negara dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional; memahami kriteria perbuatan yang baik dan yang buruk, benar dan salah berdasarkan kaidah/norma moral, terutama dalam hubungannya dengan tugas sebagai aparatur negara; mampu memberikan masukan dan solusi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita.

Setelah mempelajari materi ini, sebagaimana dijelaskan pada tiap bab (modul), maka saudara diharapkan dapat memahami dan menganalisis secara kritis beberapa hal penting berikut:

1. latar belakang masalah dan pentingnya etika pemerintahan, serta ruang lingkup etika pemerintahan yang meliputi: objek etika dan objek etika pemerintahan; jenis etika dan ciri masing-masing; kedudukan etika pemerintahan di antara cabang etika yang lain
2. konsep etika, moral, ajaran moral & etika pemerintahan
3. hubungan antara nilai, norma, moral dan sanksi
4. kewajiban, kebebasan, tanggung jawab moral kesadaran moral
5. asas-asas etis administrasi pemerintahan dan kode etik administrasi pemerintahan
6. asas-asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan
7. wewenang dan tanggung jawab pemerintah
8. tri rangkai pertimbangan dan tri rangkai tindakan manusia
9. keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur pemerintahan
10. beberapa teori tentang keadilan
11. etika profesi
12. aliran-aliran dan teori dalam etika.

SISTEMATIKA BAHAN AJAR



Gambar 1. Peta Kompetensi Matakuliah Etika Pemerintahan 2 SKS - S1

BAB I

PENDAHULUAN:

Latar Belakang, Objek (Ruang Lingkup) Dan Tujuan Mempelajari Etika Pemerintahan

Kompetensi Dasar : Setelah mempelajari bab ini mahasiswa dapat memahami latar belakang pentingnya etika pemerintahan, tujuan dan objek (ruang lingkup) etika pemerintahan, serta kedudukan etika pemerintahan di antara jenis dan cabang etika.

Sub Pokok Bahasan : Bab Pendahuluan ini berisi pembahasan tentang
a. Latar Belakang Pentingnya Etika Pemerintahan
b. Objek Etika Pemerintahan
c. Tujuan Mempelajari Etika Pemerintahan

Diskripsi Singkat : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pentingnya etika pemerintahan, objek etika, perbedaan antara objek etika umum dengan objek etika pemerintahan, etika dan cirri masing-masing, kedudukan etika pemerintahan di antara cabang etika, serta tujuan mempelajari etika pemerintahan. Pembahasan dalam bab ini merupakan kerangka dasar dan arah kajian etika pemerintahan secara umum, sehingga bab ini merupakan pengantar/pendahuluan bagi pembahasan bab-bab berikutnya.

Pertanyaan kunci :

1. Apa yang melatarbelakangi pentingnya dan tujuan mempelajari etika pemerintahan
2. Apa yang menjadi objek dan ruang lingkup etika pemerintahan
3. Bagaimana kedudukan etika pemerintahan di antara jenis dan cabang etika

BAB I

PENDAHULUAN:

Latar Belakang, Objek (Ruang Lingkup) dan Tujuan Mempelajari Etika Pemerintahan

A.Pengantar

A.1.Latar Belakang Pentingnya Etika Pemerintahan

Penyelenggaraan negara melibatkan peran serta aparatur / pejabat pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Aparatur maupun pejabat pemerintah sebagai makhluk individu memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakter antara aparatur yang satu dengan aparatur yang lain, jika tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dapat mendorong timbulnya berbagai konflik karena perbedaan kepentingan. Begitu juga dalam hal kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam hubungan pemerintahan untuk bersama-sama membangun negara demi tercapainya tujuan bangsa diperlukan sikap moral yang baik. Dengan kata lain bidang pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari sentuhan etika dan moral. Di sinilah pentingnya penyajian materi tentang etika pemerintahan sebagai pengetahuan dan pandangan tentang moral yang baik bagi aparatur/pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan aparatur pemerintah dapat menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani kepentingan rakyat demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam era reformasi sekarang ini, etika pemerintahan sebagai salah satu mata kuliah yang penting mendapatkan nuansa baru sebagai objek pembahasan, karena sifatnya yang selalu aktual sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang masih menghargai pentingnya nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mahasiswa, khususnya jurusan ilmu pemerintahan, pemahaman tentang etika pemerintahan dapat dijadikan dasar analisis kritis dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia serta bekal mental dalam ikut serta berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

B. Objek Etika dan Objek Etika Pemerintahan

B.1. Objek Material.

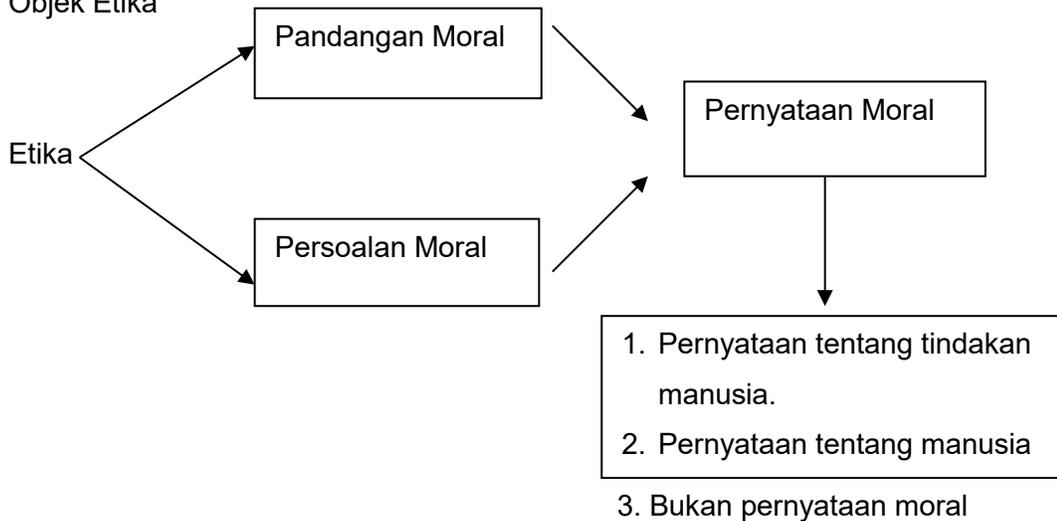
Objek material etika pemerintahan sama dengan ruang lingkup / Sub Pokok Bahasan

etika sebagai salah satu cabang filsafat yang membahas tentang nilai moral/ baik buruknya tingkah laku manusia berdasarkan norma atau kaidah moral dalam kedudukannya sebagai manusia. Adapun perbedaan antara etika pemerintahan dengan cabang etika yang lain terletak pada objek formalnya.

B.2. Objek Formal.

Pengertian objek formal adalah sudut pandang atau cara melihat kita terhadap suatu objek material tersebut. Dengan kata lain objek formal etika pemerintahan adalah pembahasan secara kritis, analitis dan mendasar tentang pandangan dan persoalan-persoalan moral yang berlaku bagi aparatur/pejabat pemerintah dalam kegiatan pemerintahan. Secara skematis objek etika dapat kita lihat sebagai berikut:

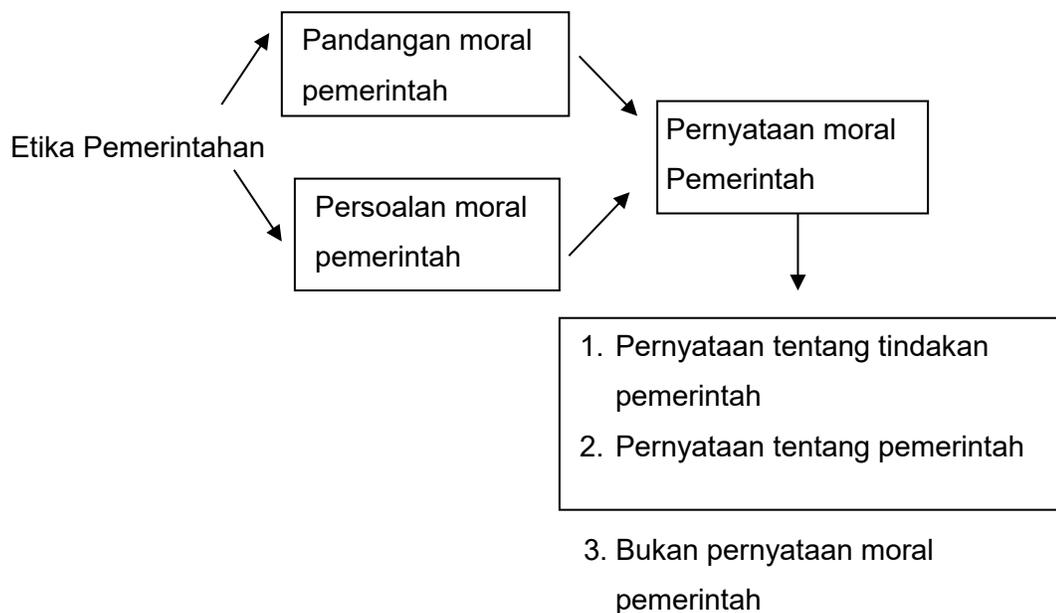
a) Objek Etika



Gambar 2.a. Kerangka Objek Etika

Berdasarkan kerangka tersebut, maka objek etika adalah pembahasan secara kritis, analitis dan mendasar tentang pandangan-pandangan moral dan persoalan-persoalan moral yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan moral yang meliputi pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia itu sendiri. Kaitannya dengan etika pemerintahan, berdasarkan kerangka tersebut maka objek formal etika pemerintahan adalah meliputi pandang moral pemerintah, persoalan moral pemerintah dan pernyataan moral pemerintah , sehingga dalam skema dapat digambarkan sebagai berikut:

b) Objek Etika Pemerintahan



Gambar 2.b. Kerangka Objek Etika Pemerintahan

C. Jenis Etika dan Ciri Masing-Masing

Berdasarkan jenis dan sifatnya, etika dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

1. Etika Deskriptif :

- Menggambarkan norma-norma yang ada di masyarakat,
- tanpa memberikan penilaian, netral, apa adanya
- Ilmu yang mempelajari etika deskriptif : Sosiologi
- Metodenya : Empiris deskriptif.

2. Etika Normatif :

- Melukiskan dan menilai, tidak netral, persuasif
- Berisi tentang apa yang seharusnya dilakukan (das sollen)
- Metode yang digunakan: Empiris Normatif.
- Di gunakan dalam berbagai cabang ilmu dan bidang kehidupan

3. Etika Analitis (Meta Etika) :

- Membahas tentang apa itu wajib, baik, buruk, adil, benar, salah dan lain-lain secara *clear dan distingtif* (jelas dan terpilah).
- Berhubungan dengan filsafat bahasa.
- Metode yang digunakan : meta empiris/ pendekatan filosofis.

D. Kedudukan Etika Pemerintahan di Antara Jenis dan Cabang Etika

Kedudukan etika pemerintahan di antara jenis dan cabang etika yang lain dapat dilihat dalam gambar 3 berikut.



Gambar 3. Kedudukan etika pemerintahan di antara jenis dan cabang etika

Berdasarkan skema di atas, maka etika pemerintahan termasuk jenis etika normatif, etika khusus, bagian dari etika sosial, salah satu dari etika profesi luhur, karena di dalamnya menjelaskan tentang asas-asas etis yang harus menjadi norma (acuan) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Asas-asas etis tersebut menjadi dasar penilaian baik-buruknya perbuatan yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyandang profesi luhur. karena mengutamakan kepentingan publik dengan asas-asas etis yang luhur.

Dengan demikian, etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berlaku bagi para aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Etika pemerintahan sebagai etika normatif/terapan mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang terdapat dalam asas-asas etis pemerintahan yang akan diuraikan dalam bab tersendiri,

Selain bersifat normatif, jika ditinjau dari cara pendekatannya, etika pemerintahan juga bersifat analitis, karena menggunakan metode filsafat. Pendekatan analitis diperlukan untuk memahami konsep dan ruang lingkup etika pemerintahan dari segi esensinya.

E. Tujuan Mempelajari Etika Pemerintahan.

Tujuan mempelajari etika pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

E.1. Tujuan Umum:

- a. Mengetahui pengertian etika pemerintahan dan fungsinya sebagai orientasi dan bekal mental bagi aparatur negara dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional.
- b. Memahami kriteria perbuatan yang baik dan yang buruk, benar dan salah berdasarkan kaidah/norma moral, terutama dalam hubungannya dengan tugas sebagai aparatur negara.
- c. Dengan mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk berdasarkan konsep moral dan etika pemerintahan, mahasiswa diharapkan mampu memberikan masukan dan solusi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita.

E.2. Tujuan Khusus:

- a. Mengetahui perbedaan antara etika, moral dan ajaran moral, pengertian etika pemerintahan dan pentingnya etika pemerintahan.
- b. Mengerti dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan nilai, norma, moral, dan sanksi, serta hubungan antara keempat unsur tersebut.
- c. Memahami makna kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab moral dan kesadaran moral.
- d. Mengerti dan memahami asas-asas pemerintahan dan asas-asas etis dalam pemerintahan.
- e. Memahami wewenang dan tanggung jawab pemerintah
- f. Mengetahui apa yang dimaksud tri rangkai pertimbangan manusia dan tri rangkai tindakan manusia sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan manusia, terutama kaitannya dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Memahami dan menghayati keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur pemerintah.
- h. Mengetahui beberapa teori tentang keadilan menurut beberapa filosof Barat.
- i. Mengetahui dan memahami etika profesi.
- j. Mengetahui beberapa aliran dalam etika dan teori etika.
- k. Memahami dan dapat menjelaskan aparaturnya penyebab berbagai penyimpangan moral/etika pemerintahan yang terjadi di negara kita dan diharapkan dapat memberikan masukan/solusi yang tepat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

F. Penutup

Etika Pemerintahan sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan mempunyai latar belakang dan tujuan yang penting dalam rangka mengevaluasi secara kritis dan analitis terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan. Bagi mahasiswa hal ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan menjadi bekal mental jika suatu saat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah. Dengan memahami seluk beluk etika pemerintahan, maka mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

G. Evaluasi

1. Jelaskan latar belakang pentingnya etika pemerintahan!
2. Jelaskan objek dan ruang lingkup etika pemerintahan!
3. Apa perbedaan antara etika umum dengan etika pemerintahan?
4. Bagaimana kedudukan etika pemerintahan di antara jenis dan cabang etika!
5. Jelaskan tujuan mempelajari etika pemerintahan!

H. Referensi

1. Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
2. Liang Gie, The, 1984, *Etika Administrasi pemerintahan*, Jakarta, Penerbit UT.
3. Magnis -Soeseno , Franz ,1997, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta.

BAB II

PENJERNIHAN KONSEP TENTANG PENGERTIAN: ETIKA , MORAL , AJARAN MORAL DAN ETIKA PEMERINTAHAN

- Kompetensi Dasar** : setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat memahami: konsep etika, moral, ajaran moral dan etika pemerintahan.
- Sub Pokok Bahasan** : Materi ini berisi pembahasan tentang
- a. Tinjauan etimologis dan terminologis tentang etika dan moral.
 - b. Persamaan dan perbedaan pengertian antara etika, moral dan ajaran moral.
 - c. Pengertian etika pemerintahan
- Diskripsi Singkat** : Bab ini menjelaskan pengertian secara etimologis dan terminologis tentang etika dan moral, persamaan dan perbedaan prinsip antara etika, moral, dan ajaran moral. Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan pula tentang pengertian etika pemerintahan.
- Pertanyaan Kunci** :
1. Apa pengertian etika, moral, dan ajaran moral.
 2. Apa persamaan dan perbedaan antara etika, moral dan ajaran moral.
 3. Apa yang dimaksud dengan etika pemerintahan.

BAB II

PENJERNIHAN KONSEP TENTANG

PENGERTIAN:

ETIKA, MORAL, AJARAN MORAL DAN

ETIKA PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Etika, Moral dan Ajaran Moral dalam percakapan sehari-hari sering kali diungkapkan dengan makna yang rancu. Ketiganya memang memiliki persamaan, yaitu sama-sama menunjuk pada baik-buruknya suatu perbuatan manusia. Namun demikian masing-masing memiliki arti yang berbeda.

A.1. Tinjauan Etimologis.

Etika ditinjau dari segi etimologis, berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” = watak, kesusilaan / moral / adat istiadat. Sedangkan moral berasal dari kata mores : adat istiadat.¹⁾

A.2. Tinjauan Terminologis.

Etika secara terminologis merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. ²⁾ Dengan kata lain etika lebih bersifat ilmiah, karena lebih menekankan pada pemikiran / rasio tentang hal-hal yang berkaitan dengan baik buruknya suatu tindakan manusia.

Sedangkan kata “moral” mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia.²⁾

Dengan kata lain, moral adalah tindakan manusia dipandang dari segi baik buruknya sebagai manusia bukan sebagai seorang ahli / tukang / buruh atau peran tertentu. Harkat dan martabat manusia terletak pada moral yang dimiliki, bukan pada status sosialnya. Hubungannya dengan etika, di sini etika memberikan alternatif pandangan tentang moral. Dengan kata lain etika sebagai ilmu yang menjelaskan berbagai pandangan moral dan persoalan moral.

B.Persamaan dan Perbedaan Antara Etika dan Moral

Persamaan antara etika dan moral yaitu: sama-sama mengacu pada baik buruknya tindakan manusia dinilai dari segi kedudukannya sebagai manusia. Adapun perbedaan antara etika dan moral adalah:

Etika :

- Lebih bersifat kajian / pengetahuan / ilmiah.
- Lebih banyak memberikan alternatif / pilihan.

Moral :

- Tindakan manusia yang sadar apakah baik atau buruk ditinjau dari segi kedudukannya sebagai manusia.
- Menekankan pada perbuatan yang sedang dinilai.

C.Etika dan Ajaran Moral.

Perbedaan yang mendasar antara etika dan ajaran moral adalah :

Etika :

- Bersifat ilmiah dan bukan sebuah ajaran, sehingga tidak berhak menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak.
- Etika merupakan ilmu pengetahuan yang analitis, deskriptif, normatif,
- evaluatif, reflektif.

Ajaran Moral :

- Dapat di ibaratkan sebagai buku petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan.
- Ajaran moral lebih berwenang untuk mengajarkan atau melarang seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sumber ajaran moral ini dapat berasal dari agama, sosial budaya atau masyarakat.

D. Etika Pemerintahan.

Pengertian etika secara terminologis di atas dapat disimpulkan sebagai filsafat atau pemikiran kritis dan analitis tentang pandangan-pandangan dan ajaran moral . Sedangkan moral adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan baik buruknya tindakan/perbuatan manusia yang ditinjau dari sisi kedudukan manusia.

Dari pengertian etika di atas, maka dapat pula dipakai untuk merumuskan pengertian etika pemerintahan. Etika pemerintahan di sini dimaksudkan sebagai etika yang berlaku dalam kegiatan pemerintahan.

Pemerintahan dalam naskah *Asas-asas Pemerintahan* terbitan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri (1994,13) didefinisikan sebagai *kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara*.

Taliziduhu Ndraha, 2003 dalam *Kybernologi 2*, menyebutkan bahwa **pemerintahan** diartikan pula sebagai *sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan –yang diperintah*. Dalam hal ini berbicara tentang pemerintahan berarti menyangkut hubungan antara **pemerintah dengan yang –diperintah**. **Pemerintah** adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil dan pemerintah wajib melayaninya.

Sentuhan etika pada kegiatan pemerintahan dapat dijabarkan dalam asas-asas pemerintahan, terutama asas-asas etis pemerintahan yang akan dibahas pada bab tersendiri. Mengenai asas-asas pemerintahan terdapat banyak pendapat dari para pakar/ilmuwan. Namun di antara mereka mempunyai persamaan pandangan. Ini menunjukkan bahwa asas-asas etis pemerintahan memiliki prinsip moral yang bersifat universal.

Asas-asas etis pemerintahan merupakan inti pembahasan materi etika pemerintahan yang menjadi dasar evaluasi kritis dan analitis berdasarkan konsep etika dan moral, terhadap perilaku pemerintah, termasuk hal-hal yang merupakan penyimpangan terhadap nilai moral, seperti: korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, asas-asas etis pemerintahan juga menjadi orientasi dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut. Bagi bangsa Indonesia, maka asas-asas etis pemerintahan harus bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan Negara.

E. Penutup

Etika, moral, dan ajaran moral secara terminologi memiliki perbedaan pengertian, namun ketiga hal tersebut mengacu pada hal yang sama, yaitu tentang baik buruknya perbuatan manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Etika pemerintahan dipahami dalam konteks kajian ilmiah dan praktis. Sebagai kajian ilmiah, etika pemerintahan memiliki objek pembahasan khusus, yaitu membahas perilaku perbuatan manusia yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab bidang pemerintahan. Dengan demikian subjek etika pemerintahan adalah aparatur pemerintahan (pemerintah).

F. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian secara terminologis tentang etika, moral, dan ajaran moral!
2. Jelaskan persamaan dan perbedaan pokok antara etika, moral dan ajaran moral !
3. Jelaskan pengertian etika pemerintahan!
4. Apa yang menjadi titik berat etika pemerintahan?

G. Referensi

1. Magnis- Suseno, Franz ,1997,*Etika Dasar*, Yogyakarta, Kanisius.
2. The Liang Gie, 1994, *Etika Administrasi Pemerintahan Negara* (Modul UT), Jakarta.
3. Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi, (1, 2)* , Bandung, Rineka Cipta.

BAB III

HUBUNGAN ANTARA 4 (EMPAT) UNSUR : NILAI, NORMA, MORAL DAN SANKSI.

Kompetensi Dasar : setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat memahami pengertian tentang nilai, moral dan sanksi dan hubungan antara 3 hal tersebut.

Sub Pokok Bahasan : Materi ini berisi pembahasan tentang

- a. Pengertian /konsep tentang: nilai, norma, moral, sanksi.
- b. Hubungan antara nilai, norma, moral dan sanksi.

Diskripsi Singkat : Bab ini menjelaskan pengertian/konsep tentang nilai, norma, moral dan sanksi. Selain penjelasan konsep tentang nilai, norma, moral dan sanksi, bab ini juga menjelaskan hubungan antara 4 hal tersebut.

Pertanyaan Kunci :

1. Apa yang dimaksud dengan nilai, norma, moral dan sanksi.
2. Apa hubungan antara empat hal tersebut

BAB III

HUBUNGAN ANTARA 4 (EMPAT) UNSUR: NILAI, NORMA, MORAL DAN SANKSI

A. Pendahuluan

Nilai, norma, moral dan sanksi dalam kajian etika merupakan satu rangkaian yang mempunyai hubungan vertikal. Agar nilai dapat diwujudkan/dilaksanakan dalam kehidupan manusia, maka diperlukan norma sebagai pedoman pelaksanaannya. Sebaliknya, nilai menjadi sumber acuan bagi norma. Manusia dalam kehidupannya berhadapan dengan berbagai norma yang bersumber dari nilai-nilai, antara lain: nilai , agama , sosial-budaya, dan hukum. Nilai-nilai tersebut dibakukan dalam bentuk norma yang masing-masing memiliki sanksi yang berbeda.

B. Nilai.

Pembahasan tentang nilai dalam filsafat secara tuntas sebenarnya merupakan objek tersendiri dalam cabang filsafat yang lain, yaitu filsafat nilai. Dalam bidang etika, masalah nilai dikaji karena berkaitan dengan nilai moral, norma dan sanksi.

B.1.Pengertian Nilai (Definisi Termologis).

1. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan berhubungan dengan moral(L.O. Katt Sof)
2. Menurut Howard Becker (*A dictionary of the social sciences*) nilai menunjuk pada sesuatu objek dari suatu kebutuhan, sikap atau keinginan (*any object of any need, attitude, or desire*).

Jadi nilai adalah sesuatu objek apapun yang mempunyai hubungan interaksi yang nyata dengan berbagai kebutuhan, sikap atau keinginan manusia.

3. Richard Bender (*A Philosophy of life,1949*) mendefinisikan nilai sebagai suatu pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan terpadu koheren yang diakui atau yang menunjang kepuasan yang demikian itu, karenanya kehidupan yang berharga adalah tercapainya sejumlah pengalaman nilai yang senantiasa bertambah.

4. *Dictionary of Sociology and Related Sciences* (ed., Henry Part Fairchild) merumuskan nilai sebagai kemampuan yang dicapai dari sesuatu objek untuk memuaskan keinginan manusia (the believed capacity of ony obyect to satisfy a human desire). Dalam hal ini nilai merupakan suatu realitas psikologis atau soal kepercayaan. Nilai berbede dengan kegunaan (utility), karena realitasnya dalam budi rokhani manusia, bukan pada objeknya itu sendiri.
5. Joseph Roucek dan Roland Werren (*Sociology, 1957*) merumuskan nilai sebagai kemampuan untuk memuaskan keinginan manusia yang dihubungkan dengan sesuatu benda, ide, atau isi pengalaman (The Capasity to satisfy a human desire which is attributed to any abject, idea, or content of experience).
6. Nilai berkaitan dengan Minat. Sesuatu benda apapun dikatakan bernilai apabila merupakan objek dari suatu minat apapun. (William Sahakian, *System of Ethics and Value Theory, 1968*).
7. George Theodorson dan Achilles Theodorson (*A Modern Dictionary of Sociology, 1970*) memberikan 2 definisi nilai sebagai berikut :
 - a. Suatu asas prilaku yang abstrak umum yang padanya anggota-anggota sebuah kelompok merasakan suatu keterkaitan positif mendalam yang bernada emosional dan yang memberikan suatu standar untuk menilai berbagai tindakan dan tujuan spesifik.
 - b. Nilai adalah suatu benda atau tujuan yang di inginkan (A desired object or goal).

Berdasarkan beberapa definisi nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berguna/bermakna, berkaitan dengan objek keinginan dan kebutuhan hidup manusia.

C. Norma

Pengertian secara umum tentang norma adalah : standar, patokan, ukuran, aturan atau pola suatu tindakan. Hubungan norma dengan nilai adalah: norma merupakan penjabaran dari nilai. Tujuan/guna norma: sebagai alat untuk menilai apakah perbuatan itu baik, buruk, benar/salah.

D. Moral

Pengertian moral adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan baik buruknya tindakan manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Moral merupakan kualitas/nilai suatu perbuatan manusia, sehingga berhubungan dengan baik atau buruk, benar atau salah, adil atau dhalim, jujur-bohong, dan sifat lain yang melekat pada tindakan manusia yang sadar dan bebas (tidak ada paksaan/ancaman).

E. Sanksi

Pengertian sanksi adalah:

- reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkannya suatu perbuatan,
- reaksi terhadap pelanggaran norma, tanggungan berupa tindakan, hukuman dan sebagainya yang memaksa orang untuk menepati janjinya atau apa yang telah ditentukan. Adanya sanksi, maka sebuah aturan/norma memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk bertindak sesuai aturan/norma tersebut.

E.1. Hubungan antara sanksi dengan norma adalah :

- sebagai pengukuhan perbuatan sesuai dengan norma
- alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma
- hukuman/ ancaman terhadap pelanggaran norma.

E.2. Macam Sanksi :

- Sanksi agama, sanksi moral, sanksi sosial, sanksi hukum.

F. Hubungan antara Nilai, Norma, Moral dan Sanksi

Hubungan antara nilai, norma, moral dan sanksi adalah sebagai berikut :
Nilai merupakan sumber bagi norma. Norma merupakan ukuran/standar/patokan nilai. Moral merupakan objek yang dinilai. Sanksi (Sanksi moral) adalah hukuman/ akibat/ reaksi terhadap pelanggaran norma moral.

G. Penutup

Nilai, norma, moral dan sanksi merupakan empat unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mendukung keberadaannya masing-masing. Tanpa nilai, maka norma tidak akan terbentuk. Demikian juga, nilai tanpa adanya norma, maka tidak ada standar / acuan sebagai dasar penilaian atas pelaksanaan nilai tersebut. Seperti halnya keberadaan norma bagi nilai, maka sanksi juga berfungsi memperkuat keberadaan norma, sehingga mempunyai kekuatan untuk memaksa individu melaksanakan norma tersebut. Sedangkan moral adalah objek yang dinilai berdasarkan norma yang ada.

H. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian nilai, norma, moral dan sanksi!
2. Jelaskan hubungan antara nilai, norma, moral dan sanksi!
3. Jelaskan perbedaan norma moral dengan norma hukum dari segi sanksinya!

I. Referensi

1. L.O. Katt Sof, 1986, *Pengantar Filsafat* (Alih Bahasa Soejono Soemargono), Yogyakarta Tiara Wacana.
2. Magnis –Suseno, Franz, 1997, *Etika Dasar*, Yogyakarta, Kanisius.
3. The Liang Gie, 1994, *Etika Administrasi Pemerintahan*

BAB IV

KEBEBASAN, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB MORAL, DAN KESADARAN MORAL

Kompetensi Dasar	: setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat memahami pengertian tentang kewajiban, kebebasan, tanggung jawab moral , kesadaran moral dan hubungan antara 4 hal tersebut.
Sub Pokok Bahasan	: Materi ini berisi pembahasan tentang makna dan hubungan antara: a. Kewajiban, b. Kebebasan, c. Tanggung Jawab Moral dan d. Kesadaran Moral
Deskripsi Singkat	: Bab ini menjelaskan tentang makna kebebasan, kewajiban, tanggungjawab moral, dan kesadaran moral, serta hubungan antara empat unsur tersebut. Pembahasan bab ini merupakan dasar pemahaman terhadap makna suatu perbuatan manusia dapat dinilai sebagai perbuatan bermoral atau tidak. Hal ini mengingat bahwa tidak semua perbuatan dapat dinilai dari sudut pandang moral, sebagaimana pernyataan tentang tindakan manusia ada yang termasuk pernyataan moral dan ada yang bukan pernyataan moral.
Pertanyaan Kunci	: Bagaimana hubungan antara kebebasan, kewajiban, tanggung jawab moral dan kesadaran moral.

BAB IV

KEBEBASAN, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB MORAL DAN KESADARAN MORAL

A. Pendahuluan

Kebebasan merupakan dasar suatu perbuatan manusia yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Tanpa adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan, maka pada hakekatnya, manusia tersebut tidak memiliki kewajiban secara moral untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya: orang-orang yang berada dalam ancaman dan tekanan/paksaan yang membahayakan keselamatan nyawanya.

B. Makna Kebebasan.

Franz Magnis Suseno (1997), dalam bukunya yang berjudul *Etika dasar* menjelaskan tentang makna kebebasan antara lain sebagai berikut.

Bebas dapat bermakna positif dan bermakna negatif.

1. Bebas dalam makna positif berarti : bebas untuk sesuatu.
2. Bebas dalam makna negatif berarti: bebas dari sesuatu/bebas dari keterikatan orang lain, bebas dari paksaan dan sebagainya.

Seseorang dikatakan bebas apabila :

1. dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya,
2. dapat memilih di antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia
3. tidak dipaksa untuk berbuat sesuatu yang tidak dipilihnya sendiri / dicegah oleh orang lain.

Jadi, kebebasan adalah suatu kemampuan yang kita sadari yang memang disengaja untuk sesuatu tujuan, apakah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

B. Macam-macam Kebebasan

Kebebasan dapat dibagi menjadi 2 berdasar sudut pandangnya, yaitu : kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Menurut Franz Magnis Suseno (1997), kebebasan dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

B.1. Kebebasan Eksistensial

Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang menyatu dengan eksistensi manusia, yaitu: kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, sifatnya positif (bebas dalam makna positif). Kebebasan Eksistensial dapat dibagi dalam beberapa segi :

- a) Kebebasan Jasmani : kemampuan manusia untuk menentukan apa yang mau dilakukan secara fisik atau kemampuan manusia untuk menggerakkan badannya (anggota tubuhnya) sebatas sebagai manusia.
- b) Kebebasan rohani : kemampuan manusia untuk menentukan sendiri apa yang difikirkan, untuk menghendaki sesuatu, untuk bertindak secara terencana. Kebebasan rohani bersumber pada akal budi kita. Kebebasan rohani manusia adalah seluas jangkauan fikiran dan bayangan manusia.

B.2. Kebebasan Sosial

Kebebasan sosial adalah kebebasan manusia dalam hubungannya dengan orang lain, yaitu kebebasan dimana kemungkinan kita untuk bertindak tidak dibatasi dengan sengaja oleh orang lain. Kebebasan sosial dapat dibagi 3 yaitu :

- a) kebebasan jasmani : apabila kita tidak berada di bawah paksaan
- b) kebebasan rohani : apabila kita bebas dari tekanan psikis
- c) kebebasan normatif : apabila kita bebas dari kewajiban dan larangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan sosial adalah kebebasan seseorang dari paksaan, tekanan atau kewajiban dan larangan dari pihak lain.

C. Tanggung Jawab Moral.

Tanggung jawab senantiasa berkaitan dengan kebebasan. Makin luas ruang kebebasan eksistensial seseorang berarti ia makin besar tanggung jawabnya. Sebaliknya, makin bertanggung jawab berarti ia makin bebas (secara moral). Menolak untuk bertanggung jawab berarti tahu dan sadar tentang apa yang

seharusnya dilakukan, tetapi tidak mau melakukannya juga, karena alasan takut susah, malas, merasa berat, lemas, emosi / sentimen dan lain-lain. Jadi menolak untuk bertanggung jawab sebenarnya bukan membuat seseorang semakin bebas, tetapi justru sebaliknya, yaitu makin kurang bebas untuk menentukan dirinya sendiri. Kemampuan kita untuk berkorban demi sesuatu tujuan yang luhur membuat kita makin tangguh dan bebas, tidak takut terhadap halangan dan tantangan yang menghadang.

D. Kewajiban dan Kebebasan.

Kewajiban selalu mengandaikan adanya kebebasan. Kewajiban itu ada karena manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri berdasarkan pertimbangan akal budinya. Oleh sebab itu hanya karena manusia memiliki kebebasan, maka manusia dibebani kewajiban. Sebaliknya, dengan memenuhi kewajiban, maka manusia menjadi bebas secara moral, yaitu bebas dari tuntutan dan sanksi moral, merasa tenang karena kewajibannya telah ditunaikan. Berbeda halnya dengan binatang yang tidak berakal budhi, maka binatang tidak punya kewajiban. Begitu juga dengan anak yang belum cukup umur (akal balig) yang belum dapat berpikir secara dewasa, maka ia belum memiliki kewajiban. Demikian pula orang gila karena akalnya tidak berfungsi secara normal, maka ia tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban.

Orang yang berada dalam kondisi terpaksa /dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya, maka ia tidak mempunyai kebebasan, sebab ia tidak dapat menentukan sendiri perbuatannya, maka ia tidak punya kewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain orang tersebut terbebas dari tuntutan kewajiban moral. Oleh karena kewajiban dan kebebasan mengandaikan adanya kemampuan budhi sebagai bahan pertimbangan dalam berbuat, maka hanya manusia yang mempunyai kewajiban moral. Binatang tidak dikenai kewajiban, karena ia tak mempunyai akal yang cukup. Begitu juga anak yang secara umur telah dewasa, namun tak memiliki akal yang cukup (idiot), maka secara moral ia tak memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral sebagaimana orang lain yang memiliki akal normal.

E. Kesadaran Moral

Kesadaran moral merupakan tingkatan kepribadian manusia yang terbentuk karena adanya peran lembaga normatif terhadap individu manusia. Peranan lembaga normatif terhadap perilaku individu adalah sebagai sumber referensi nilai moral yang terbentuk melalui proses internalisasi.

E.1.Tiga Lembaga Normatif : Masyarakat, Agama dan Negara.

Lembaga Normatif dimaksudkan sebagai lembaga atau pihak yang mengajukan norma-norma kepada kita dan mempengaruhi kepribadian kita. Masyarakat memiliki beberapa unsur antara lain: keluarga, terutama orang tua; sekolah (guru) ; ditambah lembaga informal misalnya teman sebaya, teman akrab, perkumpulan-perkumpulan (organisasi) dan lain-lain. Masyarakat dengan unsur-unsurnya tersebut dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi dan memberikan orientasi bagaimana kita hidup. Dari sanalah kita banyak belajar tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar, salah dan sebagainya.

Demikian pula agama sebagai lembaga normatif di dalamnya terdapat lembaga-lembaga informal seperti masjid, gereja dan lain-lain juga mempengaruhi tingkah laku kita. Di dalam agama kita menerima berbagai tuntutan hidup, bagaimana sikap kita terhadap orang tua, terhadap adik, kakak, tetangga dan lain-lain. Bagi seseorang yang kehidupan keagamaannya kuat tentu perilakunya sehari-hari diwarnai oleh nilai-nilai moral agama yang diyakininya. Sebaliknya , bagi mereka yang kehidupan keagamaannya kurang kuat, mungkin pengaruh agama tidak terlalu nampak terhadap pola tingkah lakunya. Mereka lebih condong mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam lingkungan pergaulannya di mana mereka tinggal.

Di sisi lain kita sebagai anggota masyarakat dan sekaligus juga sebagai umat beragama berhadapan dengan lembaga normatif yang lebih besar dan kuat yaitu negara. Negara menetapkan norma-norma hukum dan peraturan-peraturan yang wajib kita taati. Jika kita melanggar norma-norma tersebut, tentu kita akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang kita perbuat.

Ketiga lembaga normatif di atas dalam kehidupan kita menjadi sumber norma-norma moral yang membentuk kepribadian. Dari sanalah kita tahu mana perbuatan yang dianggap baik, buruk, benar, salah dan sebagainya. Proses internalisasi nilai-nilai moral yang bersumber dari ketiga lembaga normatif tersebut kedalam

kepribadian kita melibatkan unsur kepribadian kita yang disebut “ Suara hati” (Super ego).

E.2.Suara hati sebagai pangkal kesadaran moral.

Suara hati dalam bahasa Psikologisnya adalah Super ego yang bertugas memberikan dan membimbing kita untuk mengambil keputusan apa yang akan kita perbuat. Melalui interaksi sosial suara hati mengoper (mentransfer) norma-norma ke dalam batin kita yang dalam proses selanjutnya bertugas filter (penyaring) terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan-kemungkinan tindakan yang akan kita ambil. Suara hati dalam kondisi dan situasi normal tidak terlalu menonjol peranannya terhadap kepatuhan kita dalam menjalankan norma-norma yang ada di sekitar kita. Namun ketika kita dihadapkan pada berbagai alternatif dan terdapat pertentangan nilai-nilai moral dari ketiga lembaga normatif tersebut diatas, maka suara hati akan nampak jelas peranannya didalam kita mengambil keputusan.

Contoh dari kondisi dan situasi yang tidak normal tersebut misalnya : Ani adalah sebagai seorang sekretaris yang dipercaya untuk menjaga rahasia perusahaan tempat ia bekerja. Pada saat krisis moneter ternyata perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Salah satu sebab kemunduran tersebut karena manajernya korupsi sebagai sekretaris yang masih dibutuhkan tenaganya untuk memperbaiki perusahaan tersebut agar bangkit kembali, Ani harus mengevaluasi semua kegiatan proses produksi, termasuk yang menyangkut laporan keuangan. Jika rahasia korupsi yang dilakukan oleh manajer tadi dibuka maka akan dapat berakibat makin berkurangnya kepercayaan pemilik modal untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut, sehingga akan menarik sahamnya kembali dan otomatis perusahaan goncang. Proses selanjutnya perusahaan tersebut mungkin akan gulung tikar, karena tidak berhasil mendapatkan modal. Jika perusahaan tutup, otomatis Ani sebagai sekretaris juga terkena PHK akibatnya akan kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi krisis moneter Ani sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Tetapi jika rahasia korupsi yang dilakukan oleh manajer tersebut terus ditutupi, maka Ani merasa ikut berbohong dan ikut andil dalam kebangkrutan perusahaan tersebut. Lalu apa yang harus Ani perbuat ? Untuk menentukan sikap dalam mengambil keputusan tersebut, maka suara hati Ani membimbingnya, Untuk memiliki tindakan mana yang terbaik dengan penuh kesadaran tanpa dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun manajer.

Di sinilah suara hati Ani menentukan baik buruknya tindakan yang akan kita ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap akibat dari keputusan yang kita ambil.

E.3. Unsur-Unsur Kesadaran Moral.

Unsur pokok yang ada dalam kesadaran antara lain : tahu, kenal siapa dirinya dan mengerti apa akibat yang akan timbul dari perbuatan / tindakannya. Dengan demikian kesadaran moral melibatkan beberapa unsur keberibadian manusia , yaitu : Suara hati, mengenal diri sendiri dan mengerti akibat dari tindakan yang kita perbuat. Franz Magnis Suseno (1997) menyebutkan ada 3 unsur kesadaran moral, yaitu:

- a. Perasaan wajib, yaitu keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral dalam hati sanubari setiap manusia, kapan dan dimanapun. Jika hal tersebut tidak dipatuhi, maka manusia telah melakukan pelanggaran moral.
- b. Rasional, kesadaran moral dianggap rasional, karena berlaku umum, terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan.
- c. Kebebasan, yaitu merupakan kemampuan dan kondisi manusia untuk menentukan perilakunya terhadap alternatif yang tersedia.

Seseorang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam hidupnya selalu berusaha dapat mengendalikan diri terhadap tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya, karena tahu akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut.

F. Kesadaran Moral dan Tanggung Jawab Moral.

Kesadaran moral merupakan proses awal adanya tanggung jawab moral. Dengan kesadaran moral dimungkinkan adanya langkah selanjutnya dalam mengambil suatu keputusan, yaitu mendorong manusia untuk berani dan mau mengambil resiko atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dari contoh kasus di atas, maka seorang sekretaris yang memiliki kesadaran moral harus berani mengemukakan kebenaran fakta adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh manajernya, sekalipun berakibat bangkrutnya perusahaan tersebut dan dirinya di PHK. Dengan kata lain kesadaran moral berakibat adanya tanggung jawab moral yang di dalamnya terdapat kesiapan untuk berkorban. Namun pengorbanan yang dilakukan dengan penuh kesadaran moral justru akan memberikan kebebasan

moral yang berdampak pada ketenangan batin manusia. Sedangkan ketenangan batin merupakan kebahagiaan manusia yang sejati.

G. Penutup

Kebebasan, kewajiban, tanggung jawab dan kesadaran moral merupakan satu rangkaian yang memungkinkan perbuatan manusia dapat dinilai sebagai perbuatan yang bermoral atau tidak (baik/buruk). Kebebasan adalah syarat bagi adanya kewajiban. Begitupun kewajiban adalah syarat bagi adanya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral hanya dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki unsur-unsur kesadaran moral. Makin tinggi tingkat kesadaran moral seseorang, makin besar rasa tanggung jawabnya, dan sebaliknya. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran moral dalam menjalankan kewajibannya, maka akan terasa berat, karena tak adanya rasa tanggung jawab, sehingga meskipun kewajiban dijalankan, namun karena merasa terpaksa (tidak bebas), maka akan terasa lebih berat. Sebaliknya, meskipun suatu pekerjaan besar dan sulit, namun karena dijalankan dengan penuh kesadaran tinggi, maka dengan rasa tanggung jawab yang besar pula, pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (optimal).

H. Evaluasi

1. Apa yang anda ketahui tentang kebebasan ?
2. Jelaskan hubungan antara kebebasan dan kewajiban ?
3. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab moral ?
4. Sebutkan dan jelaskan 3 lembaga normatif kaitannya dengan kesadaran moral !
5. Sebutkan unsur-unsur kesadaran moral !
6. Bagaimana hubungan antara tanggung jawab moral dengan kesadaran moral?

I. Referensi

Franz Magnis Suseno, 1997, *Etika dasar*, Kanisius, Yogyakarta.

B A B V

ASAS-ASAS ETIS

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kompetensi Dasar	:	<ol style="list-style-type: none">1. mahasiswa memahami pengertian tentang: asas-asas etis administrasi pemerintahan dan asas etis pemerintahan.2. mampu menganalisis secara kritis terhadap permasalahan yang berhubungan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas- asas etis administrasi pemerintahan dan asas-asas etis pemerintahan.
Sub Pokok Bahasan	:	Materi ini berisi pembahasan tentang <ol style="list-style-type: none">a. Asas-asas Etis Administrasi Pemerintahanb. Kode Etik Administrasi Pemerintahan
Deskripsi Singkat	:	Bab ini membahas tentang asas-asas etis yang berlaku dalam bidang administrasi pemerintahan, dengan administrasinya. Bab ini dibagi dalam sub pokok bahasan penting, yaitu Asas-asas Etis Administrasi Pemerintahan dan Kode Etik Administrasi Pemerintahan.
.Pertanyaan Kunci	:	Apa yang dimaksud dengan asas-asas etis administrasi pemerintahan, kode etik administrasi pemerintahan, dan perbedaan keduanya?

B A B V

ASAS-ASAS ETIS

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Asas etis adalah pola umum yang menjadi dasar perilaku moral. Asas etis yang dimaksud dalam pembahasan bab ini adalah asas etis yang berlaku bagi para penyelenggara negara, baik yang berkenaan dengan administrasinya, maupun yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

B. 6 Asas Etis Yang Pokok dalam Administrasi Pemerintahan

Asas etis administrasi pemerintahan (The Liang Gie, 1994) meliputi 6 asas pokok, yaitu: Pertanggungjawaban (*responsibility*), Pengabdian (*dedication*), Kesetiaan (*loyalty*), Kepekaan (*sensivity*), Persamaan (*equality*), dan Kepantasan (*equity*).

1. Pertanggungjawaban (*responsibility*);

Asas etis yang menyangkut hasrat seorang petugas untuk merasa memikul kewajiban secara penuh dalam pelaksanaan tugas pekerjaan secara maksimal dan memuaskan. Asas pertanggungjawaban menjadi landasan moral bagi aparatur/aparatur pemerintahan yang memungkinkannya mampu mengemban tugas dengan baik, termasuk segala hal yang menyangkut urusan sebelum, ketika dan setelah tugas itu dilaksanakan . Hal ini berarti dibutuhkan kesadaran moral yang tinggi untuk dapat terlaksananya tugas kedinasan dengan hasil yang maksimal.

Kumorotomo (1999) dalam bukunya yang berjudul *Etika Administrasi Negara*, mengutip pendapat Herbert J. Spiro, bahwa Pertanggungjawaban dalam teori dan praktek pemerintahan memiliki 3 pengertian sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, baik eksplisit maupun implisit. Akuntabilitas eksplisit menyangkut tentang cara pelaksanaan tugas

kedinasan. Sedangkan Akuntabilitas implisit menyangkut pengaruh/efek dari pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.

- b. Pertanggungjawaban sebagai kausalitas/sebab-akibat, baik eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit dalam hal ini meliputi : sumber, pengetahuan, pilihan/alternatif dan maksud pelaksanaan tugas. Secara implisit menyangkut landasan etis pelaksanaan tugas, misalnya “kebajikan”.
- c. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban, yaitu pertanggungjawaban seorang aparatur/aparatur pemerintahan dalam kapasitasnya/sesuai dengan posisinya. Dalam hal ini ia bertanggungjawab terhadap yang memberi delegasi/perintah/wewenang.

2. Pengabdian (*dedication*).

Asas ini berhubungan erat dengan asas pertanggung jawaban. Perbedaannya Pengabdian lebih didorong oleh semangat dan niat yang tulus (tanpa pamrih) sesuai dengan tugas dan profesinya. Misalnya seorang PNS yang bekerja sebagai pegawai rumah sakit umum (negeri). Walaupun mungkin gajinya kurang mencukupi,namun hal itu tidak menyebabkan enggan dan tidak bersahabat dalam melayani pasien, melainkan harus tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan ketulusan.

3. Kesetiaan (*loyalty*).

Asas ini juga mengandung kebajikan moral berupa ketulusan untuk mematuhi peraturan dan perundangan demi tercapainya tujuan bangsa dan negara. Kesetiaan mengacu pada mono loyalitas. Jadi seorang karyawan yang memiliki tugas rangka di dalam instansi dan luar instansinya, maka hal ini jika tugas pokok di dalam instansinya terganggu karena kesibukan di luar instansinya akan berakibat berkurangnya nilai loyalitas terhadap instansi tempat ia bekerja.

4. Kepekaan (*sensivity*).

Asas kepekaan mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk siaga dan tanggap terhadap kemungkinan berbagai perkembangan dan perubahan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Suatu pemogokan / demonstrasi tidak akan terjadi jika seorang

pemimpin mempunyai kepekaan terhadap keadaan, situasi dan kondisi serta kebutuhan anggotanya. Begitu juga seorang aparatur harus tanggap terhadap perubahan-perubahan situasi dan kondisi. Sehingga tidak hanya puas dengan tugas ruinnnya dan tidak peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi.

5. Persamaan (*equality*).

Persamaan mengandung nilai moral berupa keadilan.

Setiap aparatur pemerintahan harus memberikan perlakuan yang sama dalam melayani kepentingan publik tanpa membedakan perbedaan status sosial, hubungan kerabat dan kepentingan-kepentingan pribadi.

6. Kepantasan (*equity*).

Kepantasan sebagai asas etis merupakan perimbangan asas persamaan (*equality*). Tidak selamanya perlakuan yang sama terhadap publik mnecapai keadilan dan kelayakan. Hal ini dapat kita jumpai dalam situasi dan kondisi yang khusus atau darurat. Sehingga asas keantasan mengacu pada makna keadilan yang lebih luas karena adanya unsur kepatutan/lkelayakan menurut pertimbangan moral atai nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Contoh : Pasien UGD harus mendapatkan pelayanan yang khusus dan secepatnya demi menyelamatkan nyawa seorang pasien.

C. Asas-Asas Etis yang Lain Bagi Administratur Pemerintahan.

1. Pelayanan kepada rakyat adalah yang utama.
2. Para petugas pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat.
3. Pengabdian kepada kepentingan rakyat yang terbaik dalam hal terdapat
4. peluang kebijaksanaan dalam peraturan hukum.
5. Manajemen yang efektif dan efesien dalam administrasi pemerintahan.
6. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama , dan asas-asas tindakan yang afirmatif (positif).
7. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah yang tertinggi.
8. Ciri-ciri kualitas keadilan, ketabahan, kejujuran, keantasan, kecakapan dan belas kasihan.

9. Hati nurani mempunyai peranan yang penting.
10. Aparatur pemerintah tidak hanya mencegah hal yang salah, melainkan mengusahakan hal yang benar.

D. Kode Etik Administrasi Pemerintahan

(Liang Gie, The., 1994).

Kode Etik Administrasi Pemerintahan merupakan aplikasi dari asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan yang dijabarkan secara lebih terinci. Fungsi Kode Etik Administrasi Pemerintahan adalah sebagai pedoman sikap dan tingkah laku para aparatur pemerintahan negara dan hal-hal yang perlu dihindari dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan rakyat.

Sebagai contoh dari Kode Etik Administrasi Pemerintah, di bawah ini kita ambil “ Code of Ethics of the American Society for Publik Administration “ yang memuat asas-asas dan ukuran moral bagi aparatur negara. Adapun susunannya secara lengkap tentang kode etik administrasi pemerintahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Menunjukkan standar yang tertinggi dalam integritas, kebenaran, kejujuran dan katabahan .
2. Melayani rakyat secara hormat, perhatian, sopan dan tanggap .
3. Berjuang kearah keunggulan profesional pada diri sendiri , rekan dan mereka yang akan memasuki bidang administrasi negara.
4. Menghampiri semua kewajiban dengan sikap yang positif dan mendukung komunikasi yang terbuka, kreativitas, pengabdian dan welas asih (kasih sayang).
5. Melaksanakan kewajiban resmi dengan cara yang tidak mendatangkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya.
6. Menghindari kepentingan atau kegiatan yang bertentangan dengan penunaian kewajiban resmi.
7. Menghormati dan melindungi keterangan yang khusus diperoleh dari pelaksanaan kewajiban resmi.
8. Menjalankan wewenang kebijaksanaan untuk memajukan kepentingan umum.

9. Menerima tanggung jawab untuk mengikuti perkembangan masalah-masalah baru dan mengelola urusan rakyat dengan kecakapan, kelayakan, sikap tak memihak, efisiensi dan efektivitas.
10. Mendukung, menjalankan, dan memajukan sistem penilaian kecakapan dan berbagai tindakan yang positif dalam penerimaan tenaga kerja.
11. Melenyapkan semua bentuk pembedaan yang tidak sah, kecurangan dan salah urus keuangan negara serta mendukung rekan-rekan dalam usaha demikian itu .
12. Menghormati, mendukung, menelaah, dan bila perlu berusaha menyempurnakan konstitusi dan hukum yang mengatur berbagai hubungan dalam pemerintahan.

Pentingnya kode etik bagi aparatur pemerintahan dengan demikian menjadi rambu-rambu (pedoman) sikap dan tingkah laku dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan asas-asas etis administrasi pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya, kode etik tersebut masih diperlukan lagi adanya petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas. Contoh kode etik tersebut akhirnya dalam tahun 1985 dilengkapi dengan “ *ASPA Code of Ethics Implementation Guidelines* “ yang secara rinci memberikan contoh pelaksanaan dari pasal-pasal kode etik tersebut di atas, misalnya contoh pelaksanaan pasal 5 diuraikan sebagai berikut :

“ Keuntungan-keuntungan yang semata-mata harus Anda peroleh dari pekerjaan negara adalah gaji, tunjangan , kehormatan, dan penghargaan bagi Anda. Keuntungan-keuntungan pribadi Anda dapat juga meliputi kesenangan demi melakukan suatu kerja yang baik, membantu rakyat dan mencapai tujuan-tujuan karier Anda. Tiada Abdi negara yang dipilih atau diangkat boleh meminjam atau menerima hadiah dari petugas suatu perusahaan yang membeli jasa dari atau menjual kepada ataupun diatur oleh instansi pemerintahannya. Kalau pekerjaan Anda membuat Anda sering berhubungan dengan kontraparatur yang menyediakan keperluan pemerintah. Jagalah agar Anda membayar pengeluaran-pengeluaran Anda sendiri. Harta benda, keuangan dan kekuasaan negara harus jangan diarahkan untuk kepentingan politik atau pribadi. Tunjukan secara jelas tindakan-tindakan anda bahwa anda tidak mau membenarkan sesuatu pemakaian uang negara untuk memberikan manfaat kepada diri Anda sendiri, keluarga Anda atau kawan-kawan Anda sendiri “

Contoh kode etik administrasi yang diwujudkan dalam *ASPA Code of Ethics Implementation Guidelines* tersebut merupakan penjelasan lebih jauh tentang

perlu nya seorang aparatur untuk bersikap jujur dan menjaga kepercayaan/amanat dalam mengemban tugas dan wewenang, sehingga menghindarkannya dari tindakan korupsi dan kolusi. Kode etik tersebut merupakan deskripsi dan penjabaran dari asas-asas etis administrasi pemerintahan. Kode etik adalah asas-asas etis yang telah dibakukan dan menjadi norma yang harus dipatuhi oleh mereka yang terikat dalam kode etik tersebut, dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan.

Asas-asas etis tersebut di atas, baik asas pokok maupun asas-asas lainnya yang berlaku dalam bidang administrasi negara berorientasi demi kepentingan rakyat (umum) untuk menjamin tetap tegaknya nilai-nilai keadilan sosial sebagai kebajikan moral bagi seorang aparatur pemerintahan agar tercapainya tujuan negara. Jika ditinjau dari etika profesi, maka kode etik administrasi Negara merupakan etika profesi luhur.

F. Penutup

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa asas etis administrasi pemerintahan berfungsi sebagai pedoman sikap dan tingkah laku bagi administrator pemerintahan dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan asas-asas moral yang baik. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pada prinsipnya etika administrasi pemerintahan memiliki tujuan yang sama dengan asas-asas etis pemerintahan, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perbedaannya adalah, bahwa asas etis administrasi pemerintahan menekankan pada fungsi pelayanan publik, sehingga lebih banyak berhubungan dengan implementasi kebijakan. Sedangkan asas etis pemerintahan lebih menekankan pada tugas aparatur pemerintahan sebagai pengambil keputusan/kebijakan.

G. Evaluasi

1. Sebutkan dan jelaskan 6 asas etis administrasi pemerintahan yang paling pokok!
2. Berikan contoh implementasi dari masing-masing asas etis administrasi pemerintahan dalam kebijakan pemerintah !

H. Referensi

1. Kumorotomo, Wahyudi., 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
2. Liang Gie, The., 1994, *Modul UT Etika Administrasi Pemerintahan*.

B A B V

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAN ASAS ETIS PEMERINTAHAN

- Kompetensi Dasar** :
1. mahasiswa memahami pengertian tentang: asas-asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan.
 2. mahasiswa mampu menganalisis secara kritis terhadap permasalahan yang berhubungan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas- asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan.
- Sub Pokok Bahasan** : Materi ini berisi pembahasan tentang
1. Asas-asas Pemerintahan
 2. Asas Etis Pemerintahan
- Deskripsi Singkat** :
- Bab ini membahas tentang asas-asas etis yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (masyarakat). Asas-asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai pengambil kebijakan.
- Bab ini dibagi dalam sub pokok bahasan penting, yaitu Asas-asas Pemerintahan dan Asas Etis Pemerintahan.
- .Pertanyaan Kunci** : Apa yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan?

BAB VI

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAN ASAS ETIS PEMERINTAHAN

A. Asas – Asas Pemerintahan

A.1. Pengertian asas-asas pemerintahan

Asas – asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif diperlukan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang-diperintah . (Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernologi 2 , 81). Asas-asas pemerintahan merupakan rambu-rambu /pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar tercapai tujuan negara.

A.2. Unsur-unsur asas pemerintahan

Mengenai asas-asas pemerintahan beberapa ahli berbeda dalam menyebutkan unsur-unsurnya, karena pada prinsipnya asas-asas pemerintahan antara asas yang satu dengan asas yang lain tidak bersifat terbatas, namun dapat dikembangkan lebih jauh. Taliziduhu Ndraha antara lain menyebutkan Asas-asas Pemerintahan sebagai berikut:

a) Asas memandang jauh ke depan (besturen is vooruitzien).

Asas ini mengandung pengertian adanya kemampuan untuk memandang masa depan , bukan dengan sekedar mata kepala, melainkan dengan mata hati, sehingga mampu melihat hal-hal yang tersembunyi bagi orang lain namun jelas bagi seorang aparatur pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang visioner.

b) Asas berpikir panjang

Asas ini memandang sesuatu hal dalam kerangka yang menyeluruh. Dalam hal ini seorang aparatur pemerintahan harus memiliki pengetahuan teoritik umum

(Filsafat, Metodologi, Logika dsb) dan pengetahuan teoritik khusus di bidangnya masing-masing.

c) Asas belajar dari sejarah.

Belajar dari sejarah berbeda dengan sekedar belajar sejarah. Belajar sejarah hanya bertujuan sekedar tahu tentang sejarah. Sedangkan Asas Belajar dari Sejarah berarti belajar dari Sejarah Pemerintahan yang antara lain mengandung pengertian:

- Menyadari bahwa rantai sebab-akibat kejadian (peristiwa) pemerintahan tidak bisa dipotong. Aparatur yang menjabat suatu jabatan pemerintahan dapat berubah/berhenti namun pemerintahan berjalan terus. Ini berarti setiap aparatur pemerintahan memikul beban sejarah, yaitu mewarisi keberhasilan dan kegagalan para pendahulunya.
- Menyadari bahwa dalam setiap kejadian atau peristiwa pemerintahan tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Dalam hal ini aparatur pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan.
- Menyadari bahwa meskipun setiap kejadian itu unik, pemerintah bisa berkaca dari setiap kejadian. Jangan sampai “buruk muka, kaca dibelah,” melainkan “buruk muka, muka dibenah”.
- Menyadari bahwa adalah kesalahan sejarah, jika pemerintah membenarkan kesalahannya dengan alasan bahwa orang di negara lain juga berbuat hal serupa.

d) Asas kepastian dalam perubahan .

Kepastian adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum positif. Karena masyarakat selalu berubah, maka hukum harus selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

e) Asas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat.

Hubungan antara tujuan, motif, cara dan alat dianggap serasi sepanjang :

- Tujuan tidak membenarkan cara/alat untuk mencapainya. Artinya meskipun tujuan baik, jika caranya salah, maka tidak dapat dibenarkan.
- Cara tidak membenarkan motif. Meskipun cara yang dilakukan benar, tetapi jika motifnya tidak jelas (ada udang di balik batu), maka hubungan menjadi antara keduanya tidak serasi.
- Walaupun tujuan tidak tercapai, tetapi motif terbuka/transparan, cara yang dilakukan efisien, hemat, tulus dan jujur, maka hubungan ketiganya tetap baik.
- Konsumer mampu memanfaatkan *output*. Walaupun tujuan/hasil (*output*) tercapai, tetapi konsumer tidak mampu memanfaatkannya, maka hubungan antara keduanya jelek.
- Meskipun hasil sedikit, tetapi konsumer mampu memetik manfaat besar, maka hubungan keduanya baik.

f) Asas profesionalisme.

Profesi artinya pekerjaan yang ditekuni dan dikuasai. Profesional berarti karakter dari orang yang memiliki profesi tersebut. Dalam asas ini mengandung pengertian : melakukan pekerjaan secara tekun sesuai dengan bidangnya. Di Indonesia profesionalisme lebih dihubungkan dengan ketaatan/kepatuhan pada birokrasi ketimbang pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang objektif.

g) Asas tanggung jawab.

Tanggung jawab disini bukan sekedar *accountability* dalam arti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, tetapi meliputi tanggung jawab secara luas, yaitu bertanggung jawab atas setiap peristiwa pemerintahan.

h) Asas kepatutan.

Asas kepatutan pada prinsipnya mengandung nilai-nilai etik kepantasan, terutama dalam prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini ditujukan pada aparatur pemerintahan dari aspek kekuasaannya.

i) Asas noblissime oblige.

Asas ini mirip dengan asas kepatutan, namun ditujukan pada aparatur pemerintahan dari aspek status sosialnya. Artinya bahwa seorang pejabat pemerintah dianggap memiliki jabatan terhormat, maka harus memiliki perilaku yang terhormat pula.

j) Asas kebersamaan.

Asas ini menuntut setiap aparatur pemerintah mentaatiaturan yang sama bagi semua orang. Di era reformasi asas kebersamaan dalam bidang hukum merupakan prinsip bagi terwujudnya supremasi hukum.

k) Asas tat twam asi.

Asas yang mengutamakan jiwa manusia dari pada materi.

Asas ini memandang bahwa mentalitas atau kepribadian manusia adalah hal yang lebih utama dibandingkan aspek lain yang bersifat materiil.

l) Asas *good governance*.

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap masyarakat terdapat 3 sub kultur, yaitu perusahaan, kekuasaan dan masyarakat civil. Asas tersebut antara lain nampak pada bentuk hubungan pemerintahan (hubungan antara pemerintah dengan yang-diperintah) sebagai hubungan antara produser dengan konsumen. Dalam hal ini hubungan transaksional yang terpenting adalah **Hubungan Janji dengan Percaya**. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bertanggung jawab, yaitu dalam hal ini pemerintah dapat menepati janjinya sebagaimana yang telah ditawarkan kepada masyarakat dan masyarakat telah menjatuhkan pilihannya. Jika pemerintah menepatinya, maka akan tumbuh kepercayaan masyarakat.

Asas Good Governance merupakan asas dan tujuan yang paling umum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini hanya bisa dilaksanakan oleh aparatur dan pejabat pemerintah yang memiliki mentalitas yang baik, antara lain: jujur, amanah (dapat dipercaya), memiliki kecerdasan rasio, spiritual/emosional dan kecerdasan/kepekaan sosial yang tinggi. Dengan mentalitas aparatur dan pejabat pemerintahan yang baik tersebut memungkinkan timbulnya dukungan dan kepercayaan masyarakat, karena terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan nasional.

1) Asas aktif dan positif

Asas ini menekankan bahwa pemerintah harus senantiasa berpikir positif terhadap keputusan yang akan diambil dan mengantisipasi dampak negatif dari keputusan yang telah diambil, termasuk terhadap reaksi dan protes masyarakat atas kebijakan yang terlanjur ditetapkan.

2) Asas *omnipresence*

Menurut asas ini pemerintah lebih bersifat sebagai spiritual power dari pada physical power. Dengan penghayatan pemerintahan sebagai roh, maka setiap warga negara selalu sadar hukum, meskipun tidak ada petugas yang mengawasinya.

3) Asas dengan sendirinya

Dengan asas ini, maka tak ada urusan tanpa pengurus, tak ada perubahan tanpa aturan dan tak ada masalah tanpa penyelesaian.

4) Asas sisa (residu)

Urusan yang tidak menarik bagi dunia usaha dan tidak lagi menguntungkan, tetap menjadi urusan pemerintahan.

5) Asas *discretion*

Inti asas ini yaitu kewenangan atau hak pemerintah untuk bertindak sesuai dengan pertimbangannya dalam batas-batas kekuasaannya.

6) Asas *freies ermessen*

Freies ermessen adalah asas kebebasan bertindak menurut pertimbangan hati nurani demi keselamatan manusia dan lingkungannya, dan memikul tanggung jawab atas kebebasan tersebut, baik berhasil maupun gagal. Asas ini merupakan jawaban pemerintahan terhadap perubahan sosial yang tak menentu.

7) Asas keterbukaan (transparansi),

Asas ini menuntut kondisi berbagai informasi, terbuka diri, berbagi nilai dengan tulus dan jernih serta menuntut kesadaran etiki pejabat pemerintahan.

8) Asas keutamaan.

Asas ini mengutamakan kepentingan publik. Asas ini juga memuat kemampuan membangun kemungkinan, membuat skala prioritas, memilih yang terbaik, menetapkan pilihan dan mengembangkan strategi.

9) Asas persatuan dan perbedaan,

Asas ini sebagai implementasi semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Keragaman budaya harus disadari sebagai kenyataan, bukan kesalahan, sehingga tumbuh kesadaran saling membutuhkan dan melahirkan kerjasama yang tulus yang menghasilkan kebahagiaan bersama.

10) Asas Kepercayaan dan pengharapan dalam kekecewaan.

Asas ini menjadi masalah terpenting dalam Ilmu Pemerintahan, yaitu bagaimana supaya yang-diperintah tetap percaya kepada pemerintah dan berharap akan perbaikan di masa depan, kendatipun ia kecewa berat.

Selain pendapat Taliziduhu Ndraha, terdapat pula pendapat lain tentang asas-asas pemerintahan, antara lain pendapat **E. Koswara** yang membagi Asas Pemerintahan menjadi: Asas Kepatuhan Dalam Pemerintahan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.

a. Asas kepatuhan dalam pemerintahan yang meliputi:

1) Asas kepatuhan:

- Perlakuan yang korek,
- Penelitian yang seksama
- Prosedur keputusan yang seksama
- Keputusan yang bajik dan bijak
- Motivering yang jelas dan argumentasi yang kuat
- Persamaan dan kesamaan

- Keterpercayaan
- Pertimbangan yang masuk akal dan adil
- Penyalahgunaan wewenang (sic!)
- Fair play

2) Asas pemerintahan yang baik:

- Kepastian hukum
- Keseimbangan
- Equality
- Bertindak cermat
- Motivasi
- Non Misuse of Competence
- Fair Play
- Reasonableness
- Meeting Raised (sec!) Expectation
- Un doing the Consequensesof an Unnulled (sic)
- Protecting the personal Way of Life
- Kebijaksanaan
- Public Service
-

3) Asas Pancasila:

- Berwibawa
- Jujur , bersih, dan seterusnya.

4) Asas penyelenggaraan pemerintahan

- Dekonsentrasi
- Dan seterusnya

M. Hamdi menyebutkan asas-asas Pemerintahan meliputi:

1. Aktif
2. Freies Ermessen
3. Otomatik
4. Historik

5. Etik
 6. Sentralisasi
 7. Desentralisasi
 8. Dekonsentrasi
 9. Vrij Bestuur
 10. Tugas Pembantuan
 11. Detournement de Pouvoir (sic)
- (Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology* 2, 682-697)

G. Penutup

Asas-asas etis administrasi pemerintahan dan asas etis pemerintahan merupakan landasan moral bagi aparatur pemerintahan, baik dalam proses pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Asas etis pemerintahan lebih ditujukan untuk menjaga kepercayaan dan hubungan yang baik antara pemerintah dengan yang diperintah, maupun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

H. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan dan asas etis pemerintahan? Jelaskan!
2. Jelaskan pentingnya asas-asas etis pemerintahan!
3. Berikan contoh pelaksanaan 3 asas pemerintahan dan 3 asas etis pemerintahan!
4. Di antara asas-asas etis pemerintahan tersebut, asas manakah yang merupakan asas utama dalam upaya menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

I. Referensi

1. Ndraha, Taliziduhu., 2003 , *Kybernology* (1,2), Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

- 1. Kompetensi Dasar** : mahasiswa memahami pengertian tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah
- 2. Sub Pokok Bahasan** : Materi ini berisi pembahasan tentang
- a. Pengertian Wewenang
 - b. Pengertian Kewajiban
 - c. Pertanggungjawaban Pemerintah
- 3. Diskripsi Singkat** : Bab ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab/ pertanggungjawaban pemerintah dan hubungan antara tiga hal tersebut.
- 4. Pertanyaan Kunci** : Apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah?

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

B. Pendahuluan

Wewenang dan tanggung jawab merupakan dua hal yang mempunyai hubungan horizontal. Bagi pemerintah, wewenang adalah hak/kebebasan untuk bertindak secara sah. Adanya kebebasan secara moral melahirkan kewajiban dan tanggung jawab moral. Bagi pihak lain, wewenang pemerintah menjadi hak yang diperintah/masyarakat.

C. Pengertian Wewenang

Wewenang atau kewenangan (authority) adalah kekuasaan yang sah. Max Weber menerangkan ada 3 macam tipe ideal wewenang, yaitu: wewenang tradisional, karismatik dan legal-rasional. Wewenang legal-rasional merupakan basis wewenang pemerintahan, oleh karenanya birokrasi didominasi oleh semangat *formalistic-impersonality*. Namun pandangan ini berubah sejak Chester I. Bernard mengembangkan konsep baru tentang wewenang, bahwa batu ujian untuk bangunan birokrasi bukan paradigma "hierarchical" atau "top-to-bottom model of authority". Jadi bukan prinsip bahwa bawahan harus mematuhi perintah atasan, tetapi apakah bawahan bersedia menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya. Kesediaan tersebut dibangun berdasarkan kesepakatan, sehingga penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan (Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro, *Modern Public Administration*, 1980, 133 dalam Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology* 1, 85-86).

D. Pengertian Kewajiban

Jika wewenang berhubungan dengan tanggung jawab, maka kewajiban berhubungan dengan hak (right), sedangkan hak berhubungan dengan posisi (kedudukan). Dalam hubungan pemerintahan, hak bagi pihak yang satu merupakan

kewajiban bagi pihak yang lain yang timbul dari perjanjian/kesepakatan. Dari sebuah janji lahir hak dan kewajiban. Demikian pula, dari sebuah kedudukan/posisi lahir hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain. Namun hubungan hak dan kewajiban tersebut bersifat searah. Pemerintah wajib melayani masyarakat (layanan civil) karena statusnya sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan yang nyata dan langsung, sementara bersegi dua (*tweezijdige overeenkomst*). Jadi kewajiban dapat datang dari perintah. Dengan demikian terdapat 3 sumber kewajiban, yaitu; janji (commitment), status dan perintah (mandat). Sebuah janji wajib dipenuhi. Terpenuhinya janji merupakan suatu prestasi (prestasi), sebaliknya jika tidak terpenuhi dianggap wanprestasi. Pemerintah berjanji ketika ia menerima jabatan pemerintahan di bawah sumpah. Penunai janji pemerintah dengan yang diperintah tanpa melalui lembaga perwakilan. Janji dianggap telah ditunaikan apabila proses penepatan janji itu, yaitu pemerintahan "dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang diperintah. Lembaga yang menandai akseptabilitas pertanggungjawaban adalah lembaga yang disebut mosi percaya dan jika sebaliknya disebut mosi tidak percaya (Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology 1, 86-87).

E. Pertanggungjawaban Pemerintah

Tanggung jawab (responsibility) merupakan salah satu mata rantai yang menghubungkan perintah, janji, dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Menurut Spiro, responsibility dapat diartikan sebagai *accountability* (perhitungan), sebagai obligation (kewajiban) dan sebagai *cause* (penggerak, act). *Accountability* menunjukkan sejauhmana pelaku pemerintahan terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas dari persoalan apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus, atau karena tiada pilihan lain dan dalam pada itu ia harus menerima resikonya. *Obligativeness* atau *obligedness* menunjukkan sejauhmana seorang pelaku pemerintahan menepati, menunaikan dan memenuhi janji, lahir dari kesepakatannya kepada Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri, pada suatu saat sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir/akibat dari status/posisi sebagai pemerintah. (Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology 1, 87,88)

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban, pemerintah RI bertanggungjawab dalam hal pencapaian tujuan negara yang telah ditetapkan secara

konstitusional, sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi:

...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi....

F. Penutup

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab pemerintah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan pemerintahan antara lain: menjamin keamanan negara, melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain. Dengan kata lain wewenang dan tanggungjawab pemerintah adalah memenuhi hampir semua kebutuhan hidup rakyat yang telah memberinya mandat kepadanya untuk melakukan kewajibannya.

G. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian wewenang, kewajiban dan tanggung jawab !
2. Jelaskan hubungan antara wewenang, kewajiban dan tanggung jawab!
3. Sejauhmanakah pemerintah dikatakan bertanggungjawab ?
4. Jelaskan tanggung jawab pemerintah !

H. Referensi

Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology 1*, Bandung, Rineka Cipta.

BAB VIII

TRI RANGKAI PERTIMBANGAN

DAN TRI RANGKAI TINDAKAN MANUSIA

- Kompetensi Dasar** : mahasiswa memahami pengertian tentang Tri Rangkaian Pertimbangan dan Tri Rangkaian Tindakan Manusia dan hubungan antara keduanya.
- Sub Pokok Bahasan.** : Materi ini berisi pembahasan tentang
- a. Ide Agung
 - b. Tri Rangkaian Pertimbangan Manusia
 - c. Tri Rangkaian Tindakan Manusia
- Diskripsi Singkat** : Bab ini menjelaskan tentang Ide Agung manusia yang merupakan asal mula ide/gagasan manusia tentang Tri rangkaian Pertimbangan Manusia dan Tri Rangkaian Tindakan Manusia. Tri Rangkaian Pertimbangan Manusia merupakan 3 hal yang menjadi dasar manusia sebelum mengambil keputusan. Sedangkan Tri Rangkaian Tindakan Manusia adalah dasar penilaian tindakan moral manusia, apakah baik atau tidak.
- Pertanyaan Kunci** :
1. Apa yang dimaksud dengan Ide Agung, Tri Rangkaian Pertimbangan Manusia dan Tri Rangkaian Tindakan Manusia?
 2. Jelaskan hubungan Tri Rangkaian
 3. Pertimbangan Manusia dengan Tri Rangkaian Tindakan Manusia!

BAB VIII

TRI RANGKAI PERTIMBANGAN DAN TRI RANGKAI TINDAKAN MANUSIA

A. Pendahuluan

Manusia dalam hidupnya berhadapan dengan berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Berdasarkan sumbernya, maka dasar pertimbangan manusia dalam bertindak dapat berasal dari wahyu, pengalaman empiris, ataupun dari sosial budaya yang diyakini memiliki nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Begitupun dalam tindakannya, perbuatan manusia dapat dinilai apakah bermoral atau tidak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hak asasi manusia, seperti keadilan, persamaan dan kebebasan. Bab ini bertujuan menjelaskan tentang dasar pertimbangan manusia sebelum bertindak dan dasar penilaian terhadap tindakan manusia yang terdapat dalam Tri Rangkaian Pertimbangan manusia dan Tri Rangkaian Tindakan Manusia yang bersumber dari Ide Agung.

B. Sekilas tentang Ide Agung (*Great Idea*)

Ide : Menurut Plato (+ 428-348 SM) ialah suatu objek yang budhi rohani manusia dapat memikirkannya. Dengan kata lain ide merupakan objek pemikiran manusia. Ide Agung : Adalah ide yang bersifat pokok bagi pemahaman manusia itu sendiri, masyarakat dan dunianya. Tentang jumlah ide agung masing-masing ahli/filsuf berbeda pandangan, karena perkembangan pemikiran manusia dari jaman-kejaman juga mempengaruhi munculnya ide-ide tersebut. Dari jumlah ide agung 1800 dapat diringkas menjadi 700 . Akhirnya penmelitian dan penelaan tentang ide agung tersebut berhasil memilih 102 ide agung yang dinilai menguasai pemikiran dunia barat. Mortimer Adler, editor (pemimpin editor) penelitian tentang ide agung dalam “ The Great Ideas “ *A Syntopicon of great books of the western world*), 2 jilid, 1952 yang tercetak ulang sampai 23 kali (tahun 1980) berhasil menguraikan 102 ide agung tersebut antara lain sebagai berikut :

1). Malaikat	(<i>Angel</i>)
2). Binatang	(<i>Animal</i>)
3). Aristokrasi	(<i>Aristocracy</i>)
4). Kesenian	(<i>Art</i>)
5). Astronomi	(<i>Astronomy</i>)
6). Keindahan	(<i>Beauty</i>)
7). Peradaan	(<i>Being</i>)
8). Sebab	(<i>Cause</i>)
9). Kebetulan	(<i>Chance</i>)
10). Perubahan	(<i>Change</i>)
11). Warganegara	(<i>Citizen</i>)
12). Konstitusi	(<i>Constitution</i>)
13). Ketabahan	(<i>Courage</i>)
14). Adat dan Kebiasaan	(<i>Custom and Convention</i>)
15). Definisi	(<i>Definition</i>)
16). Demokrasi	(<i>Democracy</i>)
17). Hasrat	(<i>Desire</i>)
18). Dialektika	(<i>Dialectic</i>)
19). Kewajiban	(<i>Duty</i>)
20). Pendidikan	(<i>Education</i>)
21). Unsur	(<i>Element</i>)
22). Emosi	(<i>Emotion</i>)
23). Keabadian	(<i>Eternity</i>)
24). Evolusi	(<i>Evolution</i>)
25). Pengalaman	(<i>Experience</i>)
26). Keluarga	(<i>Family</i>)
27). Nasib	(<i>Fate</i>)
28). Bentuk	(<i>Form</i>)
29). Tuhan	(<i>God</i>)
30). Baik dan Buruk	(<i>Good and Evil</i>)
31). Pemerintahan	(<i>Government</i>)
32). Kebiasaan	(<i>Habit</i>)
33). Kebahagiaan	(<i>Happiness</i>)
34). Sejarah	(<i>History</i>)

35). Kehormatan	(<i>Honor</i>)
36). Hipotesis	(<i>Hypothesis</i>)
37). Ide	(<i>Ideal</i>)
38). Kebakaan	(<i>Immortality</i>)
39). Induksi	(<i>Induction</i>)
40). Ketakterhinggaan	(<i>Infinity</i>)
41). Pertimbangan	(<i>Judgment</i>)
42). Keadilan	(<i>Justice</i>)
43). Pengetahuan	(<i>Knowledge</i>)
44). Kerja	(<i>Labor</i>)
45). Bahasa	(<i>Language</i>)
46). Hukum	(<i>law</i>)
47). Kebebasan	(<i>Liberty</i>)
48). Kehidupan dan Kematian	(<i>Life and Death</i>)
49). Logika	(<i>Logic</i>)
50). Cinta	(<i>Love</i>)
51). Manusia	(<i>Man</i>)
52). Matemetika	(<i>Mathematics</i>)
53). Materi	(<i>Matter</i>)
54). Mekanika	(<i>Mechanics</i>)
55). Ilmu Kedokteran	(<i>Medicine</i>)
56). Ingatan dan Khayalan	(<i>Memory and Imagination</i>)
57). Metafisika	(<i>Metaphysics</i>)
58). Budi Rokhani	(<i>Mind</i>)
59). Kerajaan	(<i>Monarchy</i>)
60). Alam	(<i>Nature</i>)
61). Kemestian dan Ketaktentuan	(<i>Necessity and Contingency</i>)
62). Oligarki	(<i>Oligarchy</i>)
63). Satu dan Banyak	(<i>One and Many</i>)
64). Pendapat	(<i>Opinion</i>)
65). Perlawanan	(<i>Opposition</i>)
66) Filsafat	(<i>Philosophy</i>)
67). Fisika	(<i>Physics</i>)
68). Kesenangan dan Kesakitan	(<i>Pleasure and Pain</i>)

69). Sajak	(<i>Poetry</i>)
70). Asas	(<i>Principle</i>)
71) Kamajuan	(<i>Progress</i>)
72). Ramalan	(<i>Prophecy</i>)
73). Kebijaksanaan	(<i>Prudence</i>)
74). Hukuman	(<i>Punishment</i>)
75). Kualitas	(<i>Quality</i>)
76). Kuantitas	(<i>Quantity</i>)
77). Penalaran	(<i>Reasoning</i>)
78). Hubungan	(<i>Relation</i>)
79). Agama	(<i>Religion</i>)
80). Revolusi	(<i>Revolution</i>)
81). Retorika	(<i>Rhetoric</i>)
82). Sama dan Lain	(<i>Same and Other</i>)
83). Ilmu	(<i>Science</i>)
84). Indera	(<i>Sense</i>)
85). Tanda dan Lambang	(<i>Sign and Symbol</i>)
86). Dosa	(<i>Sin</i>)
87). Perbudakan	(<i>Slavery</i>)
88). Jiwa	(<i>Soul</i>)
89). Ruang	(<i>Space</i>)
90). Negara	(<i>State</i>)
91). Pembatasan	(<i>Temperance</i>)
92). Teologi	(<i>Theology</i>)
93). Waktu	(<i>Time</i>)
94). Kebenaran	(<i>Truth</i>)
95). Kezaliman	(<i>Tyranny</i>)
96). Semesta dan Sebagian	(<i>Universal and Particular</i>)
97). Kebajikan dan Kejahatan	(<i>Virture and Vice</i>)
98). Peperangan dan Perdamaian	(<i>War and Peace</i>)
99). Kekayaan	(<i>Weakth</i>)
100). Kemauan	(<i>Will</i>)
101). Kearifan	(<i>Wisdom</i>)
102). Dunia	(<i>World</i>)

Dari 102 ide agung tersebut oleh Adler masih dapat diringkas menjadi 64 ide agung, kemudian diringkas menjadi 41 dan akhirnya diringkas lagi menjadi 6 ide agung terbesar yang mempengaruhi pemikiran orang barat, yaitu sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. <i>Beauty</i> | (Keindahan) | 4. <i>Justice</i> | (Keadilan) |
| 2. <i>Equality</i> | (Persamaan) | 5. <i>Liberty</i> | (Kebebasan) |
| 3. <i>Good and Evil</i> | (Baik dan Buruk) | 6. <i>Truth</i> | (Kebenaran) |

Diantara 6 ide agung tersebut masing-masing mempunyai hubungan erat dengan ide-ide yang lain. Dari keenam ide agung itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar sebagai berikut :

B.1. Tri Rangkai Ide Agung Pertimbangan Manusia

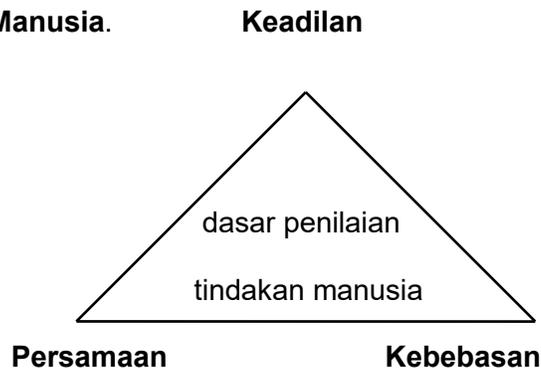
- a. Kebenaran (*Truth*)
- b. Kebaikan (*Goodness*)
- c. Keindahan (*Beauty*)



Gambar 4. Tri Rangkai Pertimbangan Manusia

B.2. Tri Rangkai Ide Tindakan Manusia.

- a. Keadilan (*Justice*)
- b. Persamaan (*Equality*)
- c. Kebebasan (*Liberty*)



Gambar 5. Tri Rangkai Tindakan Manusia

C. Tri Rangkai Pertimbangan Manusia (The Liang Gie, 1994).

Diantara 102 ide agung tersebut terdapat 3 ide agung yang menjadi pertimbangan manusia yaitu :

- Kebenaran (*Truth*)
- Kebaikan (*Godness*)
- Keindahan (*Beauty*)

Ketiga ide agung tersebut memiliki hubungan erat terhadap ide-ide agung yang lain secara tertentu. Misalnya: **Kebenaran** , biasanya berhubungan dengan pemikiran dan merupakan permasalahan dalam logika dan filsafat ilmu. Disamping itu kebenaran juga berhubungan dengan kebenaran yang terkandung dalam ilmu dan agama/*theology* (sifat kebenaran). Hal-hal yang sering dipersoalkan berkaitan dengan kebenaran, antara lain menyangkut :

- Ukuran-ukuran (kriteria) kebenaran
- Hubungan kebenaran dengan kenyataan
- Macam-macam kebenaran (berhubungan dengan teori kebenaran) : kebenaran praktis, teoritis, kebenaran makna dan kosa kata dan lain-lain.
- Landasan kebenaran : Rasio, empiris, wahyu, instink
- Segi-segi moral dari kebenaran : misalnya berkaitan dengan persyaratan untuk menemukan kebenaran, diantaranya kemerdekaan berpikir dan diskusi.

C.1. Kebenaran sebagai bahan pertimbangan manusia.

Makna benar dalam beberapa contoh kasus.

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari sering berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebenaran, misalnya :

- Dugaannya terhadap tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap X ternyata tidak benar. Tidak benar disini berarti tidak terbukti. Jadi makna benar berhubungan dengan bukti / fakta/ kenyataan.
- Perhitungan tentang biaya seminar tersebut tidak benar, sehingga penitit kerepotan. Tidak benar bisa berarti tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebenaran dapat berarti kesesuaian dengan kebutuhan/kondisi.
- Saya benar-benar tidak tahu masalah itu.
- Benar-benar = Sungguh-sungguh.

- Adalah tidak benar, jika seorang aparaturn pemerintah lebih mementingkan diri sendiri diatas kepentingan umum (publik). Benar disini berarti sesuai dengan norma moral (kode etik dan asas etis administrasi pemerintah).
- Perkataan orang itu tidak benar, sehingga tidak perlu dipercaya.
- Tidak benar = bohong . Benar = Jujur .
- Arloji saya ternyata tidak benar . Benar = Tepat.
- “Katakanlah kebenaran itu, sekalipun pahit rasanya !” benar = haq.
- Kebenaran pasti akan menang, kebatilan pasti akan hancur. Benar disini = haq.
- Pernyataan $2 + 2 = 4$ adalah benar. Benar di sini sama dengan logis (masuk akal).

C.1.a) Ukuran-ukuran (kriteria) kebenaran.

Berdasarkan beberapa contoh kalimat di atas, kriteria kebenaran antara lain sebagai berikut :

- Kesesuaian dengan fakta/ bukti/ kenyataan : kebenaran empiris.
- Kesesuaian dengan kebutuhan (kondisi).
- Kesungguhan.
- Kesesuaian dengan norma.
- Apa adanya = objektif = jujur.
- Kemutlaqan = haq = tidak bisa dibantah.
- Kesesuaian dengan nalar (rasio / logis / akal).
- Ketepatan.

C.1.b) Macam-macam Kebenaran.

Macam-macam kebenaran dapat dijelaskan sesuai dengan teori / pandangan / aliran, antara lain :

- Kebenaran Praktis → kebenaran berdasarkan manfaat langsung ; sesuai dengan pandangan Pragmatisme.
- Kebenaran Teoritis → kebenaran berdasar teori / ajaran / konsep.
- Kebenaran Kosa Kata → kebenaran berdasar makna yang dikandung dalam suatu konteks kalimat.
- Kebenaran Koherensi → kebenaran berdasarkan keruntutan proses berpikir / logis.

- Kebenaran Korespondensi → kebenaran berdasarkan fakta, empiris

C.1.c) Sumber Pengetahuan yang menghasilkan kebenaran.

Adanya bermacam-macam kebenaran ditentukan oleh sumbernya. Adapun yang menjadi sumber pengetahuan yang menghasilkan kebenaran antara lain :

- a) Rasio → menghasilkan kebenaran logis, koherensi, matematis.
- b) Empiri (pengalaman) → menghasilkan kebenaran korespondensi , kebenaran ilmiah (empiris).
- c) Wahyu → menghasilkan kebenaran dogmatis, kebenaran mutlaq.

Selain sumber tersebut ada juga sumber kebenaran lain yang berlaku dalam kehidupan manusia, antara lain :

- d) Instink = Naluri → paranormal sering berlandaskan pada kebenaran instink,
- e) Intuisi → menghasilkan kebenaran intuitif.

C.1.d) Segi moral yang terkandung dalam kebenaran.

contoh :

- Syarat menemukan kebenaran adalah adanya kebebasan berpikir dan diskusi, misalnya : Kebenaran Ilmiah adalah kebenaran objektif yang diperoleh dari adanya kebebasan berpikir, tanpa adanya tekanan dan paksaan psikis. Begitu juga dalam diskusi ilmiah juga harus bebas dari tendensi-tendensi subyektirisme dan unsur-unsur non ilmiah.
- Kebenaran Normatif : kebenaran berdasarkan norma.
- Kebenaran Pragmatis : kebenaran berdasarkan manfaat praktis (tujuan tertentu).

C.1.e) Sifat-sifat Kebenaran.

Berdasarkan sifatnya, kebenaran dapat dibedakan antara lain :

- Kebenaran Subyektif - Relatif → berdasarkan subyek tertentu.
- Kebenaran Objektif - Universal → sesuai dengan objeknya : ilmiah.
- Kebenaran Intersubyektif → masing-masing subyek membenarkan.
- Kebenaran Dogmais → bersumber dari wahyu / agama (absolut).
- Kebenaran Logis/ valid/ sah menurut prinsip berpikir logis.

C. 2. Kebaikan Sebagai Pertimbangan Manusia.

Kebaikan sebagai pokok bahasa dalam etika pada umumnya dikaitkan dengan hasrat manusia dan perwujudannya dalam tindakan manusia. Ide kebaikan ini dalam kehidupan manusia dapat dihubungkan dengan banyak hal, antara lain :

- Orang yang suka menolong dikatakan sebagai orang yang baik.
- Kemauan / niat baik = itikad baik - tanpa pamrih - ikhlas.
- Hubungan baik antara tetangga = hidup rukun sesama tetangga (damai).
- Masyarakat yang baik = tertib - aman - damai.
- Perlakuan yang baik - sikap dan tindakan yang berkenan bagi pihak lain (terpuji).
- Pengetahuan yang baik - pengetahuan yang mengandung kearifan.
- Kendaraan yang baik / bagus - tidak rusak mesinnya, nyaman dipakai.
- -Manusia yang baik - manusia yang memiliki sifat, sikap dan tindakan yang terpuji (perilaku yang disukai orang banyak).

C.2.a) Definisi kebaikan menurut beberapa tokoh :

A.R Lacy dalam *A Dictionaty of Philosophy*, 1981 secara umum menyimpulkan bahwa “ god “ atau “ baik “ adalah sifat yang menimbulkan pujian.**Peter A. Angeles** dalam *Dictionary of Philosophy*, 1981 memberikan pengertian tentang kebaikan sebagai berikut :

- Suatu objek dari minat, nilai atau hasrat. (any object of interest, value, or desire)
- Suatu objek dari kemauan rasional.
- Suatu yang diiringi oleh kemauan.
- Hasil dari aktivitas perenungan atau perasaan-perasaan yang meliputi aktivitas demikian itu.

C.2.b) Sifat-sifat Kebaikan.

Angeles menyimpulkan sifat-sifat kebaikan sebagai berikut :

- Persetujuan, pujian,keunggulan,kekayaan,Ketetapan

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ide agung mengenai “ kebaikan “ sesungguhnya merupakan pencerminan dari hakekat manusia yang

pada dasarnya baik dan condong / suka kepada hal-hal yang benar, baik dan indah. Oleh karena itu ide kebaikan berhubungan dengan ide “ keindahan “ dan “ kebenaran”, karena hal itu merupakan kebutuhan hidup manusia secara ideal / sempurna, yaitu apabila dapat mencapai aspek-aspek ketiga aspek tersebut.

C. 3. Keindahan Sebagai Bahan Pertimbangan Manusia.

Secara mendetail, keindahan menjadi bahan / objek kajian cabang filsafat tersendiri, yaitu dibahas dalam Estetika. Keindahan secara umum meliputi keindahan alam, keindahan seni, keindahan intelektual dan keindahan moral. Keindahan alam bersifat alamiah/asli, sedang keindahan seni lebih bersifat baru, kreatif , cenderung berubah (dinamis) dan memiliki berbagai corak pandangan (aliran). Keindahan intelektual antara lain dapat tercermin dalam karya seni yang mengandung nilai-nilai sosial, politik , budaya, agama dan lain-lain.

Adapun keindahan moral dapat tercermin dalam perilaku manusia yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian secara ideal keindahan moral dapat dicapai manusia bukan sekedar formalitas kepatuhan terhadap norma-norma sosial, melainkan lebih didasarkan pada motivasi / niat dan bentuk perbuatan itu sendiri. Suatu perbuatan yang secara lahiriah sesuai dengan norma, namun jika dilakukan dengan terpaksa, bukan karena kesadaran moral yang bersumber dari hati nurani, maka belum / tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang etis / bermoral. Dengan demikian keindahan moral mengandaikan adanya keseimbangan antara isi dan bentuk perbuatan itu sendiri, sehingga merupakan suatu keutuhan perilaku manusia yang mengandung nilai-nilai luhur.

C.3.a) Kriteria Indah.

Keindahan meliputi keindahan alam dan keindahan seni. Keindahan seni merupakan keindahan tiruan terhadap keindahan alam sebagai aktualisasi potensi jiwa seniman.

Keindahan alam

Menurut Erich Kahlen keindahan alam mencerminkan unsur-unsur Keselarasan (*Harmony*).

- Ketakselarasan yang luar biasa (*extrem disharmony*).
- Kewarna-warnian (*Colourful*).

- Ketenangan (*calm , idyllic*).
- Ciri keluasan, tak terpahami (*vast, impenetrability*).

Keindahan Seni.

Menurut Eric Newton, keindahan karya seni bersumber dari pemahaman budhi manusia terhadap alam semesta. Dengan demikian keindahan artistik merupakan manifestasi cinta manusia terhadap pola yang berdasarkan pemahamannya tentang pola alam. Unsur-unsur keindahan karya seni antara lain :

- Keseimbangan
- Keutuhan
- Kesetangkupan (simetris)

D. Hubungan antara ketiga ide Agung pertimbangan manusia.

Berdasarkan uraian tentang ketiga ide tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara ide yang satu dengan ide yang lain memiliki keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

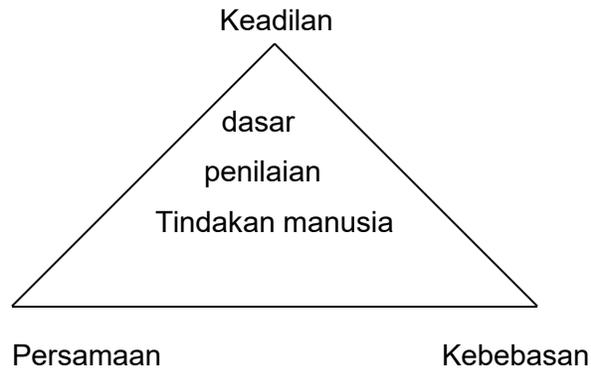
- a. Kebenaran menjadi dasar untuk tercapainya keindahan dan kebaikan moral.
- b. Ketiga ide tersebut dilandasi oleh hasrat dan cinta manusia yang terwujud dalam rasa senang terhadap objek yang memiliki unsur-unsur kebenaran, kebaikan dan keindahan.
- c. Budhi rohani manusia dengan suara hati sebagai sumber kesadaran moral (F. Magnil - Suseno) memiliki peranan penting dalam mencapai kebenaran, kebaikan dan keindahan moral.

D.1. Hubungan Unsur Kepribadian Manusia dengan 3 Ide Agung Pertimbangan Manusia.

- a) Akal / Rasio berhubungan dengan ide kebenaran.
- b) Kemauan/ karsa/ kehendak berhubungan dengan ide keindahan.
- c) Emosi/ rasa/ perasaan berhubungan dengan ide keindahan.
- d) Rasio berfungsi menjustifikasi/ menilai benar/ salahnya sesuatu hal
- e) Karsa/ kehendak berhubungan dengan penilaian apakah sesuatu hal itu baik atau buruk.
- f) Rasa / perasaan berfungsi menilai apakah suatu hal itu indah atau jelek.

E. Tri Rangkai Ide Tindakan Manusia.

- Keadilan
- Persamaan
- Kebebasan



Tiga ide tindakan manusia tersebut bersumber pada ide kebaikan yang masing-masing berkaitan satu sama lain. Keadilan berfungsi memimpin ide persamaan dan kebebasan. Dengan kata lain keadilan, persamaan dan kebebasan hanya berlaku bagi manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial. Keadilan, persamaan dan kebebasan merupakan tindakan manusia yang merupakan manifestasi dari ide kebaikan.

E.1. Hubungan unsur-unsur 3 ide tindakan manusia

Hubungan di antara ketiga ide tindakan manusia dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kebebasan merupakan dasar tindakan moral, tanpa ada kebebasan suatu tindakan tak dapat dinilai baik atau buruk (Franz Magnis Suseno).
- Kebebasan merupakan keinginan setiap orang , sehingga merupakan hak asasi setiap manusia.
- Persamaan diwujudkan dengan bersumber pada nilai keadilan. Persamaan merupakan cita-cita yang ingin dicapai bagi pihak yang lebih lemah dalam kehidupan politik.
- Keadilan merupakan tindakan dan kebajikan moral yang harus diwujudkan oleh pihak yang lebih kuat (penguasa) dalam kehidupan politik.
- Keadilan menjadi dasar kebebasan penduduk. Dengan demikian tak ada kebebasan yang tanpa batas.

Dengan keterkaitan 3 ide tindakan manusia tersebut, maka akan tercapai cita-cita hidup bersama yang aman, tertib dan damai, karena masing-masing pihak (yang

lemah dan yang kuat) menyadari tanggung jawabnya untuk bersama-sama mewujudkan ketiga ide tersebut.

E.2. Makna-makna Keadilan antara lain :

1. Kepantasan (*Equity, Equitableness*)
2. Kelayakan (*Fair ness*)
3. Persamaan perlakuan (*Equality of Treatment*)
4. Perlakuan tepat
5. Kelurusan (*Rectitude*)
6. Hukum (*Law*)
7. Kesahan menurut hukum (*Lawfulness*).
8. Sikap tidak memihak
9. Kebenaran

E.3. Persamaan dan Kebebasan

Persamaan dan kebebasan merupakan unsur-unsur hak asasi manusia yang menjadi landasan hubungan interaksi sosial. Persamaan dan kebebasan menjadi dasar penilaian tindakan/perbuatan moral manusia, apakah termasuk baik atau buruk yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan sosial, .

F. Penutup

Tri rangkaian Pertimbangan Manusia dan Tri Rangkaian Tindakan Manusia merupakan sumber nilai moral yang menjadi dasar perbuatan manusia dan dasar penilaian tindakan manusia, apakah bermoral atau tidak. Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa Tri rangkaian Pertimbangan Manusia merupakan dasar sebelum manusia mengambil keputusan. Sedangkan Tri Rangkaian Tindakan Manusia adalah dasar penilaian atas tindakan yang sedang atau telah dilakukan.

G. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan ide agung?
2. Jelaskan pengertian dan hubungan unsur-unsur yang terkandung dalam Tri Rangkaian Pertimbangan Manusia dan Tri Rangkaian Tindakan Manusia dalam kehidupan manusia!

H. Referensi

1. The Liang Gie, 1994, **Etika Administrasi Pemerintahan Negara**, Modul UT.

BAB IX

KEADILAN SEBAGAI KEBAJIKAN MORAL BAGI APARATUR PEMERINTAHAN

Kompetensi Dasar : mahasiswa memahami pengertian tentang keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur pemerintahan

Sub Pokok Bahasan : Materi ini berisi pembahasan tentang

1. Makna keadilan secara umum dan kaitannya dengan tugas aparatur pemerintahan
2. Pokok-pokok pikiran tentang kebajikan menurut beberapa filsuf
3. Pentingnya keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur pemerintahan

Diskripsi Singkat : Bab ini menjelaskan tentang makna keadilan secara umum dan kaitannya dengan tugas aparatur pemerintahan. Selain itu, bab ini juga memberikan contoh pokok-pokok pikiran tentang kebajikan menurut beberapa filsuf Yunani Kuno, antara lain menurut Sokrates, Plato dan Aristoteles.

Pertanyaan Kunci :

1. Jelaskan makna keadilan secara umum
2. Berikan contoh pokok-pokok pikiran tentang kebajikan menurut salah satu filsuf Yunani Kuno!
3. Jelaskan pentingnya keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur pemerintahan

BAB IX

KEADILAN

SEBAGAI KEBAJIKAN MORAL

BAGI APARATUR PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Keadilan mengandaikan adanya persamaan dan kebebasan. Keadilan dalam bidang pemerintahan merupakan kebajikan moral yang harus diupayakan oleh seorang aparatur pemerintahan (aparatur pemerintahan) terhadap masyarakat sebagai pihak yang diperintah dan sekaligus yang membutuhkan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab moral aparatur pemerintahan sebagai seorang penyelenggara negara yang harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Keadilan sebagai suatu cita-cita luhur bangsa sekaligus menjadi landasan bagi publik untuk mendapatkan persamaan hak dan kebebasan.

Keadilan sebagai nilai luhur yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan negara. menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain. Bagi bangsa Indonesia, moral keadilan dalam implementasinya merupakan modal mental (sumber daya manusia) dalam usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia IV.

Bab ini bertujuan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian keadilan dan kebajikan moral. Begitu juga tentang pentingnya keadilan bagi aparatur pemerintahan. Beberapa contoh makna kebajikan moral menurut beberapa filsuf Yunani Kuno, seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles juga diuraikan dalam bab ini. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang makna keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur/aparatur pemerintahan. Bagi bangsa Indonesia hal ini penting, mengingat keadilan merupakan salah satu nilai moral yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Makna keadilan secara umum dalam kaitannya dengan tugas Aparatur Pemerintahan.

1. Keadilan merupakan perlakuan yang tepat, benar.
2. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua pihak, tanpa memandang perbedaan status sosial masing-masing pihak.
4. Memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dengan layak.

C. Pokok-pokok Pikiran Tentang Kebajikan Menurut Beberapa Filsuf.

C.1. Pokok pikiran tentang kebajikan menurut Sokrates.

- a) Semua hal adalah pengetahuan.
- b) Kebajikan adalah pengetahuan (kearifan/ kebijaksanaan).
- c) Sejak zaman Yunani Kuno, kebajikan dinyatakan sebagai ciri kualitas yang membuat seseorang baik dalam segi watak maupun pikirannya.
- d) Pokok-pokok Kebajikan menimbulkan keselarasan pada jiwa.
- e) Kebajikan lawannya adalah kejahatan.

C.2. Pokok-pokok pikiran tentang kebajikan menurut Plato

- a) Setiap hal memiliki fungsi.
- b) Kebajikan adalah ciri kualitas yang membuat sesuatu hal melaksanakan fungsinya secara baik.
- c) Tanpa kebajikan suatu negara tidak dapat melaksanakan fungsinya secara baik.
- d) Kebajikan yang utama bagi negara meliputi : kearifan, ketabahan, disiplin dan keadilan.

C.3. Pokok-pokok tentang kebajikan menurut Aristoteles.

1. Kebajikan pada manusia merupakan kegiatan dari akal dan berbagai kebiasaan yang tersusun secara rasional sehingga memungkinkannya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Kabajikan bersumber dari kodrat alam, kebiasaan dan asas rasional.
3. Kebahagiaan merupakan manivestasi dan pelaksanaan secara sempurna dari kebajikan sebagai tujuan akhir dari kelakuan dan kehidupan manusia.
4. Kebajikan-kebajikan mampu menimbulkan kebahagiaan karena manjadi sebab-sebab dari pemikiran dan tindakan baik seseorang yang berhubungan dengan hal-hal-hal seperti kesehatan, kesenangan, persahabatan, kekayaan yang tercakup dalam kebahagiaan.

C.4. Pengertian Kebajikan menurut Ensiklopedi Pendidikan (1981)

Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja dan H. A. Harahap (1981) dalam Ensiklopedi Pendidikan mendefinisikan kebajikan sebagai berikut.

Kebajikan

Pada umumnya suatu keadaan jiwa yang tetap serta suatu kesanggupan yang membuat manusia cenderung akan berlaku dengan ketetapan hati menurut syarat-syarat kesusilaan. Keadaan jiwa dan kesanggupan hati itu diperoleh dengan jalan melatih diri dengan tekun. Sudah sejak jaman dahulu kala ahli filsafat Yunani membeda-bedakan empat kebajikan pokok yaitu: Kebajiksanaan, Keadilan, Keteguhan hati dan Kesederhanaan.

Berdasarkan definisi dalam kutipan tersebut di atas, maka kebajikan merupakan kondisi yang tetap dari kepribadian seseorang yang memungkinkan seseorang mampu bertingkah laku berdasar norma norma kesusilaan. Unsur-unsur kebajikan melibatkan rasio hati, emosi, sikap dan tindakan seseorang, sehingga menghasilkan empat kebajikan yaitu :

- Kebijaksanaan/ kearifan → bersumber dari rasio / kebajikan intelektual.
- Keadilan → wujud/ tindakan yang adil.
- Keteguhan → bersumber dari hati/ kebajikan hati.
- Kesederhanaan → sikap hidup yang mencerminkan kebajikan hati.

Kebajikan sebagai unsur kepribadian dapat terbentuk melalui proses interaksi sosial, yang dengan itu manusia mengenal norma-norma baik norma budaya, agama, susila dan lain-lain sebagai pertimbangan dan petunjuk tingkah lakunya dalam

kehidupan. Kebajikan merupakan kebaikan moral dan intelektual seseorang yang dapat terwujud dalam kebahagiaan yang hakiki yang menjadi tujuan akhir hidup manusia. Kebajikan sebagai keutamaan moral dapat dicapai melalui pendidikan moral/akhlaq, mulai dari pendidikan di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

D. Pentingnya Keadilan Sebagai Kebajikan Moral Bagi Aparatur Pemerintahan Negara.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan tentang keadilan dan kebajikan tersebut di atas, maka kiranya dapat dijabarkan bahwa keadilan sebagai kebajikan moral aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting sesuai dengan fungsinya, yaitu menjalankan roda pemerintahan negara. Dengan keadilan sebagai kebajikan moral, maka seorang aparatur negara akan memiliki sifat-sifat yang terpuji antara lain :

1. Arif / bijaksana dalam memimpin
2. Memberikan hak/ apa yang semestinya diterima oleh orang lain.
3. Mau memperbaiki kesalahan dengan jalan memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan dan hukuman kepada pelaku kesalahan.
4. Memberikan perlakuan yang sama terhadap siapapun sesuai dengan haknya tanpa membedakan status sosial.
5. Mengutamakan pelayanan kepada publik di atas kepentingan pribadi.
6. Tidak berbuat yang merugikan orang lain.
7. Dengan keadilan sebagai kebajikan moral yang utama, maka akan terbentuk kebajikan moral yang lain seperti keteguhan / ketabahan, yang menimbulkan kesabaran dalam menjalankan tugasnya, serta memiliki sikap hidup dan manipulasi.
8. Sederhana, sehingga tidak mendorongnya untuk berbuat yang merugikan negara dengan melakukan korupsi .

E. Penutup

Keadilan merupakan salah satu unsur kebajikan moral yang paling penting bagi seorang pemimpin Negara (aparatur pemerintahan). Hal ini mengingat keadilan merupakan nilai moral yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab manusia, baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial, terutama sebagai pemimpin.

F. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian keadilan secara umum.
2. Jelaskan makna keadilan dalam kaitannya dengan tugas aparatur pemerintahan.
3. Jelaskan beberapa pokok pikiran tentang kebajikan moral menurut filsuf Yunani Kuno!
4. Jelaskan pentingnya keadilan sebagai kebajikan moral bagi aparatur pemerintahan.

G. Referensi

1. The Liang Gie, 1994, *Etika Administrasi Pemerintahan Negara*, Modul UT.
2. Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.

BAB 10

TEORI KEADILAN

Kompetensi Dasar	: mahasiswa memahami pengertian tentang teori keadilan.
Sub Pokok Bahasan	: Materi ini berisi pembahasan tentang a. Pengertian Teori Keadilan b. Teori Keadilan Menurut Beberapa Filsuf
Deskripsi Singkat	: Bab ini menjelaskan tentang pengertian keadilan dan contoh teori keadilan menurut beberapa filsuf, antara lain menurut Plato dan John Rawls.
Pertanyaan Kunci	: 1. Apa yang dimaksud dengan keadilan? 2. Apa saja yang terkandung dalam makna keadilan menurut Plato dan John Rawls relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara?

BAB 10

TEORI KEADILAN

A. Pendahuluan.

Di muka telah dijelaskan bermacam-macam makna keadilan. Antara makna, konsepsi, definisi dan teori sering kali dianggap sama. Oleh karena itu perlu dibedakan terlebih dahulu secara jelas, antara makna, definisi, konsepsi dan teori.

Makna adalah arti yang dikandung dalam suatu ide yang melekat di dalamnya. Makna dari satu ide dapat bermacam-macam, contoh **makna keadilan** : kepantasan, kelayakan, persamaan perlakuan, perlakuan tepat, kelurusan, hukum, kesahan menurut hukum, sikap tidak memihak, kebenaran dan lain-lain. Makna dapat membedakan dan mempersamakan keadilan dengan hal-hal lain.

Konsepsi dari kata konsep (ide) . **Konsepsi** adalah kategori pengertian tertentu dalam pemikiran , manusia dan kedudukan entitas suatu hal (ide) dalam kehidupan suatu kelompok orang. Contoh : Konsepsi tentang “ keadilan sebagai nilai “, “ keadilan sebagai kebajikan moral” dan lain-lain

B. Definisi Keadilan

Definisi adalah rumusan yang lebih terinci dan jelas tentang suatu ide, sehingga orang dapat mengetahui tentang ide tersebut.

Contoh :

Definisi keadilan yang asli sejak zaman Romawi adalah :

“ Justitia est constant et perpetua voluntas jus suun cuiqui tribuendi “.

“ Justice is the constant and perpetual will to render to each man what is his due”

Artinya : Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.

Definisi keadilan menurut keputusan-keputusan pengadilan di Amerika misalnya:

4. Keadilan adalah hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan peradilan yang bebas dari prasangka (jadi sikap tidak memihak) dan

pengaruh yang tidak selayaknya. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

5. Keadilan adalah suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya (jadi benar menurut pertimbangan kebajikan atau ide kebaikan yang diterima masyarakat umum.

Demikian contoh-contoh perbedaan antara makna, konsepsi dan definisi tentang keadilan.

C. Teori Keadilan.

Definisi keadilan sekalipun memberikan rumusan yang terinci namun tidak menjelaskan mengenai alasan suatu hal disebut sebagai suatu keadilan. Teori keadilan adalah suatu uraian yang berusaha secara runtut dan sistematis menjelaskan dasar alasan, ukuran pembenaran, sifat dasar atau asal mula dari keadilan.

Contoh :

C.1. Teori Keadilan Plato.

Teori keadilan Plato sebenarnya menurut pengakuan Plato adalah pendapat-pendapat gurunya yaitu Socrates (+ 470 - 399 SM), yang dengan tegas membedakan adanya keadilan negara dan keadilan pada orang. Menurut Plato dalam suatu negara yang ideal terdapat 4 kebajikan utama (Cardinal virtues) yaitu:

- a). Kearifan (*Wisdom*) / kebijaksanaan.
- b). Ketabahan / keteguhan (*Courage*).
- c). Disiplin (*Discipline / temperance*).
- d). Keadilan (*Justice*).

Empat kebajikan tersebut berlaku pada orang dan negara. Pada negara, kearifan adalah kabajikan yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Kearifan di sini adalah kemampuan penguasa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu seorang penguasa dianggap arif jika mampu berbuat demikian.

Kebajikan yang kedua : Ketabahan, terdapat pada para prajurit yang bertugas sebagai pengaman negara. Sedangkan kebajikan yang ke tiga : disiplin dimiliki oleh para pengrajin. Dengan kearifannya penguasa memimpin golongan yang dianggap

kurang arif dan mereka bersedia dipimpin. Sehingga menurut Sokrates kebajikan yang ketiga merupakan keselarasan alamiah yaitu adanya persetujuan (*Agreement*) di antara golongan-golongan dalam masyarakat.

Adapun keadilan menjadi landasan ketiga kebajikan tersebut. Menurut ide-ide Plato, keadilan merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga kesatuannya.

Selain itu, dalam suatu negara, perlu adanya spesialisasi tugas, sehingga masing-masing orang melaksanakan satu pekerjaan secara profesional. Dengan demikian keadilan dapat terwujud jika profesionalisme dijalankan. Sebaliknya, keadilan tidak akan terwujud, jika masing-masing orang mencampuri pekerjaan/ tugas orang lain. Dalam hal ini seorang penguasa bertugas membagi-bagikan fungsi / tugas masing-masing anggotanya. Dengan demikian keadilan adalah sebuah kebajikan. Selain keadilan moral, terdapat keadilan prosedural (hukum) yang berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan keadilan moral, yang kedudukannya lebih tinggi dari pada hukum positif dan adat kebiasaan. Selanjutnya, menurut Plato, yang harus memerintah suatu negara adalah orang yang arif, yaitu filsuf, bukannya hukum, karena hukum tidak memahami secara sempurna apa yang dianggap adil. (Hukum hanya merupakan salah satu produk manusia). Fungsi penguasa adalah memerintah warganya dan menjamin kesejahteraannya. Oleh karena itu harus memiliki watak yang baik : jujur, adil, arif, berpandangan luas, disiplin dan memiliki keberanian.

Pelajaran yang dapat diambil dari teori keadilan Plato bagi seorang aparatur negara adalah sebagai berikut :

6. Seorang aparatur perlu memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya melayani kepentingan rakyat / publik.
7. Kebajikan moral seorang aparatur pemerintah sangat diperlukan untuk bekal dalam menjalankan tugasnya dengan baik : adil, jujur, berani, bertanggung jawab, penuh kasih sayang, sopan dan penuh perhatian.

C.2. Teori Keadilan John Rawls (*A Theory of justice*, 1971).

Secara ringkas Teori Keadilan John Rawls dapat dijelaskan sebagai berikut. Persoalan tentang keadilan muncul jika suatu masyarakat menilai pranata-pranata dan prakteknya dengan tujuan menyumbangkan kepentingan-kepentingan

saling bersaing dan tuntutan saling bertentangan yang dari anggota masyarakatnya. Dengan kata lain teori keadilan Rawls berpangkal dari adanya pertentangan kelas dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan.

Solusinya adalah perlu ditetapkan prosedur yang adil agar hasilnya juga adil. Hasil yang dimaksud adalah asas-asas keadilan yang berlaku untuk berbagai pranata (institusi) dan praktek dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya kontrak sosial dengan mengindahkan asumsi-asumsi mengenai :

- a). Kerja sama manusia (*Human Couperation*).
- b). Pilihan yang rasional (*Rational Chorce*).
- c). Hal-hal baik yang bersifat utama (*Primory goods*).
- d). Moralitas minimal (*Minimal morality*).
- e). Rasa keadilan (*Sense of justice*).

Yang dimaksud *primory goods* adalah hal-hal baik yang diinginkan oleh setiap anggota masyarakat, yaitu antara lain :

- Hak-hak (*rights*).
- Kebebasan-kebebasan (*leberties*).
- Kesempatan-kesempatan (*oppartunites*).
- Kekuasaan-kekuasaan (*powers*).
- Penghasilan (*income*).
- Kekayaan (*wealth*).

Untuk melaksanakan kontrak sosial tersebut Rawls memberikan 2 konsep, yaitu :

- a). *The Original Position* (Kedudukan semula).
- b). *Ignorance Principle* (Asas ketidaktahuan).

Dua konsep tersebut untuk mencegah penyelewengan wewenang dan kekuasaan. Berdasar prosedur yang adil, maka ditetapkan 2 asas keadilan , yaitu sebagai berikut :

- a). Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*) yang berlaku sama untuk semua orang.
- b). Ketidaktahuan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian hingga ;
 - b).1. Memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung.
 - b). 2. Bertalian dengan jabatan-jabatan (*offices*) dan kedudukan (

posistion) yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persyaratan persamaan kesempatan yang layak.

Berkaitan dengan asas keadilan pertama tersebut terdapat berbagai kebebasan dasar bagi setiap orang, yaitu :

- Kebebasan Politik, yaitu hak memiliki dan memegang jabatan Negara (*political liberty*).
- Kebebasan Berbicara dan berkumpul (*freedom of speech and assembly*).
- Kebebasan Hati Nurani (*liberty of Conscience*).
- Kebebasan Berpikir (*freedom of thought*).
- Kebebasan Diri Pribadi (*freedom of the person*).
- Hak memiliki harta benda pribadi (*the right to hold personal property*).
- Kebebasan dari pemahaman dan penangkapan yang sewenang-wenang (*freedom from arbitrary arrest and scizure*).

Adapun berkaitan dengan asas ketidaksamaan (asas yang ke dua) tersebut di atas, maka hal itu berlaku bagi keuntungan dari mereka yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu dalam praktek penggajian perlu dipertimbangkan mengenai perbedaan kecakapan pendidikan, jabatan, pengabdian dan lain-lain. Jika semua pegawai negeri yang memiliki pendidikan dan jabatan yang berbeda-beda mendapatkan gaji yang sama, maka hal itu merupakan ketidakadilan, karena tidak sesuai dengan kelayakan dan kepantasan sebagai bagian dari makna keadilan.

Manfaat yang dapat diambil dari Teori John Rawls bagi kepentingan Adminitrasi pemerintah kurang lebih sebagai berikut :

- setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia .
- Perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota yang lain dalam menduduki jabatan Negara karena berdasarkan prosedur yang adil yang disepakati oleh semua anggota.
- Keadilan berarti mengandung makna yang luas, yaitu adanya unsur persamaan, kelayakan, kepantasan, kesesuaian dengan prosedur.
- Penghargaan kepada anggota masyarakat yang menduduki jabatan negara didasarkan atas kecakapan, kemampuan, pendidikan, jabatan dan pertimbangan lain yang sesuai dengan asas keadilan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan secara umum tentang makna keadilan sebagai berikut:

Teori keadilan Plato menggambarkan bagaimana suatu kebijakan mempunyai fungsi yang sangat besar dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, sehingga menjamin kesejahteraan bagi warganya. Keadilan sebagai kebijakan moral dan prosedural dibandingkan dengan hukum positif dan adat kebiasaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga seorang penguasa yang arif harus dapat menciptakan keadilan bagi warga dan negaranya. Seorang filsuf lebih tepat memimpin negara, karena memiliki watak yang utama : jujur, adil, cinta kebijaksanaan, berani, penuh kasih sayang terhadap sesama dan selalu bersemangat mencari pengetahuan.

Teori Keadilan John Rawls mengandung makna keadilan sebagai suatu kebutuhan anggota masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan golongan dan kepentingan-kepentingan. Keadilan tidak identik dengan kesamaan, melainkan didalamnya terdapat unsur persamaan, kelayakan dan kepantasan.

E. Evaluasi

1. Terangkan teori keadilan menurut Plato!
2. Terangkan teori keadilan menurut J. Rawls!
3. Manfaat apa yang dapat diambil dari teori tentang keadilan menurut kedua tokoh tersebut? Jelaskan!.

F. Daftar Pustaka

1. The Liang gie, 1994, *Etika Administrasi Pemerintahan Negara*, Modul UT.
2. Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.

BAB XI

ETIKA PROFESI

- Kompetensi Dasar** : mahasiswa memahami pengertian tentang Etika Profesi, hubungan/kedudukan etika pemerintahan negara dalam etika profesi dan pentingnya etika profesi dan macam-macam profesi.
- Sub Pokok Bahasan** : Materi ini berisi pembahasan tentang:
1. Pengertian etika profesi.
 2. Hubungan/kedudukan etika administrasi pemerintahan negara dalam etika profesi.
 3. Pentingnya etika profesi dan macam-macam profesi.
- Deskripsi Singkat** : Bab ini menjelaskan pengertian etika profesi yang di dalamnya dibedakan antara jenis profesi umum dan profesi luhur. Berdasarkan jenis profesi, maka bab ini juga menjelaskan kedudukan etika administrasi pemerintahan dalam etika profesi dan pentingnya etika profesi.
- Pertanyaan Kunci** :
1. Apa yang dimaksud dengan etika profesi?.
 2. Bagaimana hubungan/kedudukan etika administrasi pemerintahan negara dalam etika profesi?
 3. Jelaskan pentingnya etika profesi bagi kehidupan manusia!

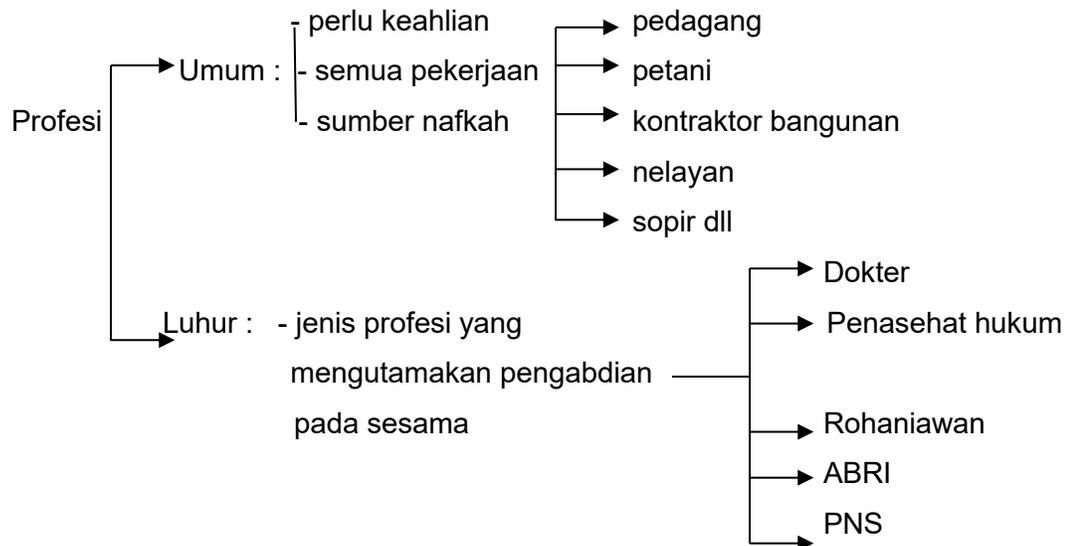
BAB XI

ETIKA PROFESI

A. Pendahuluan

Setiap manusia normal dalam kehidupannya memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi ketrampilan/keahlian yang dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Sumber mata pencaharian dalam istilah lain disebut sebagai profesi. Bab ini menjelaskan tentang jenis profesi dipandang dari segi moral/etika dan beberapa hal penting yang berkaitan dengan etika profesi.

B. Kerangka Penggolongan Profesi.



Gambar 6. Kerangka Penggolongan Profesi

C. Kedudukan Etika Administrasi Negara Dalam Etika Profesi.

Dilihat dari kedudukannya diantara cabang-cabang etika sebagaimana di terangkan dalam Bab I (Pendahuluan) Etika Administrasi / Etika Pemerintahan merupakan bagian dari cabang Etika Profesi. Adapun dalam hubungannya dengan

jenis profesi dapat dibedakan antara profesi umum dan profesi luhur. Profesi Umum adalah segenap pekerjaan untuk memperoleh nafkah hidup yang tujuannya lebih mengutamakan pengabdian pada sesama manusia. Berdasarkan penggolongan jenis profesi, maka Etika Administrasi / Pemerintahan diperuntukkan bagi profesi luhur, karena lebih mengutamakan pengabdian seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya yaitu melayani kepentingan publik demi terselenggaranya pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa.

D. Prinsip Etika Profesi.

D.1. Profesi Umum.

Terdapat 2 prinsip Etika profesi pada umumnya, yaitu :

- a) Sikap bertanggung jawab.
- b) Dengan keahlian, kompetensi dan cara kerja yang efektif dan efisien, maka seorang yang memiliki profesi umum bertanggung jawab atas pekerjaan dan hasil yang akan dicapai. Sikap tanggung jawab juga berhubungan dengan dampak pekerjaan tersebut terhadap orang lain, sehingga menyangkut aspek sosial, antara lain terhadap rekan kerja, atasan, bawahan dan lingkungan kerja serta lingkungan alam di sekitarnya.
- c) Hormat terhadap hak orang lain.
- d) Prinsip ini merupakan tuntutan keadilan agar kita memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Prinsip tanggung jawab dalam hal ini antara lain mengharuskan kita untuk bekerja / berusaha dengan bertindak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain, bagi generasi sekarang, maupun yang akan datang.

D.2. Profesi Luhur.

D.2.a) Prinsip profesi luhur

Perbedaan prinsip profesi umum dengan profesi luhur terletak pada 2 prinsip bahwa profesi luhur memiliki **prinsip**:

- Mendahulukan kepentingan pasien / klien / publik.
- Seorang dokter harus lebih mementingkan kepentingan pasiennya di atas kepentingan pribadi. Begitu juga ahli hukum/ penasehat hukum. Tidak berbeda halnya seorang abdi negara, aparatur pemerintah, ABRI dan

PNS lainnya seharusnya lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

- Pengabdian pada tuntutan luhur profesi.
- Tuntutan bagi profesi luhur dalam hal ini berhubungan dengan KODE ETIK tertentu. Seorang dokter harus taat pada kode etik kedokteran. Begitu juga aparatur pemerintah, juga harus mematuhi kode etik administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu. Di Indonesia PNS seharusnya menghayati dan mentaati KODE ETIK PNS , seorang Penasehat Hukum dan Pembela (Pengacara) harus mentaati KODE ETIK HUKUM dan lain-lain, sehingga dalam mengemban tugasnya mereka tidak terjebak dalam penyalahgunaan / penyelewengan wewenangnya. Dengan demikian mereka akan terhindar dari perbuatan korupsi, kolusi dan sejenisnya yang akan dapat merugikan negara dan rakyat.

D.2.b). Moralitas Profesi Luhur :

- Berani berbuat dengan bertekad. Dengan moral ini seorang yang memiliki profesi luhur harus memiliki kepribadian yang kuat, yang tidak mudah terbawa arus emosi, malas,takut, benci dan ancaman pihak lain yang tidak sesuai dengan tuntutan profesinya.
- Kesadaran berkewajiban. Dengan kesadaran dan perasaan wajib untuk melaksanakan profesinya, maka seorang yang menyandang profesi luhur sekalipun berat beban yang dipikulnya, tetap berusaha dengan penuh kesadaran, merasa wajib untuk melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.
- Idealisme.Moral ini melandasi sikap mental seorang yang memiliki profesi luhur, sehingga mampu bekerja tanpa pamrih dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya.

E. Penutup

Etika profesi sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak hanya penting bagi mereka yang menyandang profesi luhur, namun juga bagi mereka yang berprofesi umum,

sebab keduanya menitikberatkan perlunya sikap tanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

Etika profesi luhur dalam era Reformasi diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga penyelewengan-penyelewengan wewenang dan jabatan selama masa pemerintahan ORBA tidak terulang lagi di masa pemerintahan yang akan datang.

F. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan etika profesi? Jelaskan!
2. Terangkan kedudukan etika administrasi negara dalam etika profesi!
3. Jelaskan pentingnya etika profesi luhur bagi aparatur pemerintah!

G. REFERENSI:

1. Burhanudin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
2. Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*.

BAB XII

ALIRAN-ALIRAN DALAM ETIKA

DAN TEORI ETIKA

- Kompetensi Dasar** : Setelah mempelajari bab ini mahasiswa dapat memahami macam- macam aliran dalam etika dan teori etika.
- Sub Pokok Bahasan** : Materi ini berisi pembahasan tentang
a. Aliran Etika
b. Teori Etika
- Diskripsi Singkat** : Bab ini menjelaskan teori etika dan aliran-aliran dalam etika serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.
- Pertanyaan kunci** : Di antara beberapa aliran etika, aliran dan teori etika manakah yang paling sesuai dengan pelaksanaan etika pemerintahan?

BAB XII

ALIRAN-ALIRAN DALAM ETIKA DAN TEORI ETIKA

A. Pendahuluan

Perkembangan pemikiran tentang moral menghasilkan banyak aliran-aliran atau pandangan-pandangan mengenai baik buruknya suatu tindakan manusia. Aliran-aliran tersebut mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan gambaran / kriteria sesuatu perbuatan dianggap baik / buruk, benar atau salah.

B. Aliran-Aliran dalam Etika

Diantara aliran-aliran yang banyak berpengaruh dalam kehidupan manusia, antara lain :

B.1. Aliran Vitalisme

B.1. a) Tokoh dan pandangan aliran Vitalisme

Aliran Vitalisme merupakan perkembangan Idealisme. Aliran mengagungkan arti hidup. Menurut pandangannya, seseorang dianggap baik jika orang tersebut mengembangkan hidupnya. Salah satu tokoh aliran itu adalah J.G. Vietsche (1762 - 1814 M). Menurut pendapatnya yang baik itu adalah bila seseorang dapat menjadikan sedemikian rupa sehingga dirinya menjadi manusia yang super.

Nampaknya aliran ini sederhana, namun secara ekstrem ternyata mempengaruhi pemikiran bangsa Jerman, sehingga seorang Hetler dengan Naziismenya dalam Perang Dunia II berhasil menghancurkan bangsa lain, karena memandang bangsanya sebagai bangsa yang super, yang paling tinggi diantara bangsa-bangsa lain. Aliran Vitalisme jika ditinjau dari segi positif memacu semangat hidup dan etos kerja seseorang, sehingga merupakan bekal mental dalam meraih suatu cita-cita, karier dan target suatu pekerjaan dengan cara mengembangkan potensi diri. Pengaruh Vitalisme terhadap kehidupan manusia, antara lain menyebabkan manusia menjadi optimis terhadap masa depannya, tidak takut

menghadapi tantangan dan kendala yang menghalangi langkahnya. Oleh karena itu vitalisme menolak aliran yang berbau menghambat.

B.1.b) Analisis dan tanggapan terhadap pandangan aliran Vitalisme

Kaitanya dengan tugas seorang aparatur pemerintahan, maka vitalisme secara positif sangat cocok. Namun jika ditinjau dari segi negatifnya dapat menimbulkan pertentangan tentang nilai dan asas etis yang lain, seperti nilai keadilan, persamaan hak asasi manusia dan kebajikan-kebajikan moral lainnya sebagai manusia, karena pandangannya yang egosentris (egois) dan merendahkan manusia lain.

B.2. Aliran Positivisme.

B.2.a) Tokoh dan pandangan aliran positivisme

Tokoh aliran ini adalah August Comte (1798 - 1857 M). Menurut pendapatnya, sejarah perkembangan pemikiran manusia melalui 3 tahap, yaitu tahap teologi, metafisik, dan positif. Tahap teologi merupakan tahap dimana manusia dikuasai oleh hukum-hukum Tuhan secara total, sehingga manusia merasa terikat oleh norma-norma ketuhanan, akibatnya manusia cenderung tergantung dengan norma Tuhan dan merasa tidak bebas. Adapun pada tahap metafisis, manusia mulai berusaha melepaskan keterikatannya terhadap hukum Tuhan dengan menggantikan kedudukan / peran wahyu diganti dengan akal / rasio sebagai satu-satunya landasan mencari kebenaran tentang segala sesuatu dengan cara abstraksi dan berpikir secara metafisis (mencari esensi di balik hal yang nampak). Selanjutnya pada tahap ketiga, yaitu tahap positif, manusia lebih menekankan hal-hal yang telah tertentu / pasti / positif dialami oleh manusia. Segala hal yang tidak mungkin dialami oleh manusia dianggap tidak ada. Makna positif di sini bukan sebagai lawan dari negatif (buruk). Aliran positivisme menganggap hal yang baik adalah segala sesuatu yang secara positif (pasti) bermanfaat bagi manusia jadi bersifat pragmatis.

B.2.b) Analisis dan tanggapan dari sudut pandang Etika Administrasi/Pemerintahan Negara terhadap pandangan aliran positivisme.

Aliran etika positivisme yang bersifat pragmatis dapat memotivasi seseorang untuk mengejar segi manfaat praktis dalam tindakan dan perilaku sebagai aparatur/aparatur pemerintahan. Dari segi ini terdapat kecenderungan untuk mencari

keuntungan secara langsung dalam melaksanakan tugasnya, sehingga membuat seseorang langsung berpikir pendek dan dapat menempuh jalan pintas. Segi positifnya, pandangan ini membuat seorang aparatur tidak hanya memandang segala hal dari aspek prosedural dan teoritis saja, tetapi lebih menekankan langkah-langkah yang positif / praktis dalam mencapai suatu target / tujuan organisasi, sehingga lebih bersifat dinamis dan pro aktif.

B.3. Aliran Hedonisme.

Yaitu suatu aliran yang memandang bahwa kenikmatan atau akibat-akibat yang nikmat di dalam dirinya terkandung kebaikan. Secara ekstrem, hedonisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika mendatangkan kenikmatan atau kebahagiaan.

B.3.a) Corak / Jenis Hedonisme.

Hedonisme dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu:

Hedonisme Psikologis, menyatakan bahwa :

- Manusia dalam kenyataannya berusaha mencari kenikmatan.

Hedonisme Etis, menyatakan bahwa :

- Manusia seharusnya mencari kenikmatan / kebahagiaan yang sebesar mungkin.

Hedonisme Egoistis, berpendirian bahwa :

- Seharusnya yang kita usahakan adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri.

Hedonisme Altruistis (Utilitarianisme), berpendirian bahwa :

- Satu-satunya prinsip kesusilaan adalah kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi manusia sebanyak mungkin. Tokohnya : Jeremy Bentham dan J.S. Mill.

B.4. Aliran Epikurisme.

Aliran ini berpendapat bahwa suasana kebahagiaan, ketentraman jiwa, ketentraman batin sebanyak mungkin dinikmati dan sedikit mungkin menderita.

B.5. Stoisisme (Aliran Stoa).

Aliran ini berpendapat bahwa kebahagiaan adalah melepaskan diri dari setiap keinginan.

B.6. Evolucionisme adalah :

Aliran yang berpendapat bahwa tujuan akhir manusia sebagai evolusi ke arah puncak tertinggi yang makin diketahui bentuknya. Tokoh : - Herbert Spencer, Thomas Hill Green, J. Dewey.

C. Teori Etika.

Jika kita kelompokkan tentang pandangan-pandangan moral, kesusilaan / etika, maka terdapat beberapa teori etika, yaitu etika umum dan etika khusus.

C.1. Etika Umum :

C.1.a) Teori Deontologis.

Teori deontologist mencoba menjawab persoalan-persoalan etika berdasarkan hakekat kebaikan / keburukan, benar / salah. Dalam teori ini, antara lain dibahas : apa itu baik, apa itu buruk, mengapa sesuatu itu dikatakan baik / buruk ? kriteria apa yang menyebabkan sesuatu dapat dikategorikan baik / buruk dan lain-lain. Dengan kata lain teori deontologis membahas tentang baik buruknya perbuatan manusia berdasarkan substansi perbuatan itu sendiri, lepas dari tujuan/akibat dari perbuatan itu .

Menurut teori deontologis perbuatan manusia dinilai baik karena secara imperatif kategoris (perintah tak bersyarat) perbuatan itu memang baik dan wajib dilakukan. Sebaliknya perbuatan manusia dinilai buruk, karena secara imperatif kategoris manusia merasa wajib untuk meninggalkannya. Perasaan wajib untuk meninggalkan perbuatan tersebut, karena secara substansial perbuatan tersebut memang buruk. Tokoh teori deontologist antara lain: Immanuel Kant.

C.1.b)Teori Teleologis.

.Teori etika yang membahas masalah moral berdasarkan tujuan terakhir. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan kesusilaan berusaha mencari serta menemukan kebahagiaan atau kenikmatan. Tujuan terakhir disini bisa berupa keselamatan abadi dan ada pula yang menitikberatkan pada kenikmatan / kebahagiaan (hedonistik). Teori teleologis dalam etika memandang baik buruknya perbuatan manusia berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

C.2. Etika Khusus.

Selain 2 teori etika yang secara umum tadi, maka ada pula teori etika yang bersifat teologis, yaitu yang mendasarkan diri pada nilai-nilai ketuhanan. Menurut teori etika teologis satu-satunya sumber kebaikan hanyalah Tuhan, karena Tuhanlah sebagai sumber tertib, sehingga hanya Dialah yang berhak menuntut pertanggung jawaban tingkah laku / perbuatan manusia.

Etika teologis dalam perkembangannya akhirnya dijumpai adanya beberapa etika religious, antara lain: Etika Kristiani, Etika Islam, Etika Budha dan lain-lain, yang diperuntukkan bagi umatnya masing-masing. Contoh Etika Islam (Akhlak): menurut Imam Ghazali yang menjadi dasar penilaian baik buruknya perbuatan manusia adalah agama dan akal (Al-Qur"an dan Sunnah dengan pertimbangan akal sehat). Dengan kata lain agama dan akal menjadi dasar pertimbangan baik buruknya perbuatan manusia.

Menurut Imam Ghazali terdapat 4 sendi akhlak, yaitu: hikmah, syaja'ah, iffah dan 'adil. Hikmah merupakan kemampuan manusia untuk mengetahui benar salahnya tindakan (sesuatu). Syaja'ah merupakan keberanian mental untuk melakukan perbuatan yang menurut akal dan agama adalah benar dan meninggalkan perbuatan yang menurut agama dan akal adalah salah. Iffah merupakan sikap kehati-hatian dalam bertindak, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan yang buruk. Sedangkan adil merupakan keseimbangan dari ketiga sendi akhlak lainnya dan merupakan akhlak yang ideal. Hal ini karena adil akan terwujud jika ketiga sendi akhlak lainnya sudah dimiliki.

D. Penutup

Aliran dan teori etika berkembang sebagai respon terhadap persoalan moral dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Aliran etika yang menjadi salah satu pandangan hidup manusia mempunyai pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku individu. Setiap aliran etika mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bagi bangsa Indonesia aliran dan teori etika dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap persoalan moral yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara.

E. Evaluasi

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran dalam etika!
2. Sebutkan teori etika secara umum dan jelaskan masing-masing teori etika tersebut!.
3. Apa yang menjadi landasan penilaian bagi baik buruknya perbuatan manusia menurut etika Islam ?
4. Terangkan relevansi ajaran etika Al-Ghazali dengan etika administrasi negara, khususnya tentang 4 sendi akhlak!

F. Referensi

1. Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
2. Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*.
3. Franz Magnis Suseno, 1997, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta.

P E N U T U P

Demikianlah garis-garis besar yang merupakan pokok-pokok perkuliahan Etika Administrasi Negara yang menguraikan tentang pandangan-pandangan dan norma moral yang berlaku bagi manusia dan terutama diorientasikan untuk kepentingan administrasi negara dengan berdasarkan pada konsep dan ajaran beberapa tokoh .

Dengan menganalisa secara kritis tentu saja banyak kita jumpai kekurangan dan kelebihan tentang pandangan-pandangan moral yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan/negara. Hal ini merupakan fapaturat manusiawi yang tak luput dari segala kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial dan pencinta ilmu pengetahuan untuk selalu berusaha menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut.

Lepas dari segala kekurangan tersebut penyusun memandang betapa pentingnya materi perkuliahan Etika Administrasi Negara , terutama bagi mereka para aparatur pemerintahan dan calon aparatur pemerintahan. Oleh karena itu penyusun berharap materi tersebut kiranya dapat menambah wawasan, untuk selanjutnya menjadi bekal mental bagi mereka yang terlibat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Burhanuddin Salam,
1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
2. Hadiwijono, Harun,
1985, " *Sari Sejarah Filsafat Barat II* ", Yogyakarta, Penerbit Kanisuis.
3. Djohermansyah dkk, 2001, *Modul UT Etika Pemerintahan*
4. Katt Soff, L.O.
1986, *Pengantar Filsafat (Element of Philosophy)*, alih bahasa oleh Drs.
Soejono Soemargono, Yogyakarta, Penerbit Tiara Wacana.
5. Liang Gie, The.
1984, " *Etika Administrasi Pemerintahan* ", Jakarta , Penerbit UT
6. Magnis - Soeseno, Franz
1997 " *Etika Dasar. Masalah - masalah Pokok Filsafat Moral* , Yogyakarta,
Kanisus.
7. Magnis - Soeseno dan Team
1989, " *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT. Gramedia.
8. Mudlor Achmad , Drs., *Etika Dalam Islam* ", Surabaya, Penerbit Al Ikhlas.
9. Ndraha, Taliziduhu
2003, *Kybernology*, (1,2), Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
10. Poedjowijatno, Prof. I.r.
1980 " *Pembimbing Ke Arah Filsafat* ", Jakarta, Penerbit PT. Pembangunan.
11. Peursen, Van,C. A, Prof. dr.
1985 " *Strategi Kebudayaan* ", Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
12. Rawls, John, *Teori Keadilan* (Keadilan Sebagai Fairness terj dari. *Theori of Justice*, Harvard University Press, Cambridge , Massachusetts
13. Saefuddin Anshari, Endang, H, MA
1987 " *Ilmu, Filsafat dan Agama*", Surabaya, PT. Bina Ilmu.
14. Sunoto.1985. *Mengenal Filsafat Pancasila Melalui Pendekatan Etika Pancasila*, cetakan ketiga, PT. Hanindita, Yogyakarta.

15. Sunoto. 1987. *Mengenal Filsafat Pancasila Seri 4: Filsafat Sosial Politik Pancasila*, cetakan pertama, edisi revisi Andi Offset, Yogyakarta.
16. Widjaja, A, W, Drs.
1983 “ *Etika Administrasi Negara*”,_ Palembang, Penerbit Bumi Aksara.
17. Wahyudi Kumorotomo,
2005, *Etika Administrasi Negara*, Jakrta, PT Rajagrafindo Persada.
18. Yeremias T, Keban,
2004, “*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*”, *Konsep. Teori, dan Isue*”, Yogyakarta, Penerbit gava Media.